

# Fajar turnitin bab 1- dafpus.docx

*by turnitin cek*

---

**Submission date:** 20-Sep-2024 09:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2460027807

**File name:** Fajar\_turnitin\_bab\_1-dafpus.docx (263.64K)

**Word count:** 14801

**Character count:** 101360

### ABSTRAK

Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Kota Surabaya, dengan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik serta perkembangan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai upaya penanggulangan stunting melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Anggota DPRD, dan petugas puskesmas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah mengintegrasikan program-program terpadu dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan gizi dan perawatan prenatal melalui implementasi Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022. Koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Surabaya menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan program kesehatan yang efektif. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Surabaya aktif dalam advokasi kebijakan kesehatan dan pengawasan program, meskipun perlu perjuangan lebih lanjut dalam menjamin alokasi anggaran yang memadai. Petugas puskesmas, di sisi lain, berperan penting dalam memberi layanan kesehatan langsung kepada ibu hamil dan balita, dengan fokus pada monitoring gizi dan perawatan prenatal.

**Kata Kunci:** Stunting, Penanggulangan, Dinas Kesehatan, Anggota DPRD, Petugas puskesmas, Surabaya

141

**ABSTRACT**

Stunting is a significant public health issue in Surabaya City, with long-term impacts on the physical growth and development of children. This research aims to gain a comprehensive understanding of efforts to combat stunting through interviews with various stakeholders, including the Surabaya City Health Office, members of the Surabaya City Council (DPRD), and community health center (puskesmas) staff. The interviews revealed that the Surabaya City Health Office has integrated comprehensive programs and increased public awareness of nutrition and prenatal care through the implementation of Mayor Regulation No. 79/2022. Close coordination with the Surabaya City Government is crucial in formulating effective health policies and programs. Meanwhile, members of the Surabaya City Council are actively involved in health policy advocacy and program oversight, although securing adequate budget allocations remains a challenge. On the other hand, community health center staff play a crucial role in delivering direct healthcare services to pregnant women and toddlers, focusing on nutrition monitoring and prenatal care.

**Keyword:** Stunting, Mitigation, Health Office, Surabaya City Council,

community health center staff, Surabaya

59  
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting adalah salah satu fokus dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kedua yang bertujuan untuk menghapus kelaparan dan berbagai bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penurunan angka stunting sebesar 3,9%, dengan target mencapai 40% pada tahun 2025. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)<sup>1</sup>.

Stunting memiliki dampak besar pada perkembangan otak dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan seumur hidup bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah stunting pada balita. Intervensi yang dilakukan perlu melibatkan berbagai sektor, baik kesehatan maupun non-kesehatan, seperti masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta, serta kolaborasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tindakan kolektif ini harus mencakup perbaikan gizi melalui intervensi spesifik (jangka pendek) dan intervensi sensitif (jangka panjang)<sup>2</sup>.

Menurut data dari UNICEF, WHO, dan World Bank Group (2019), prevalensi stunting pada balita di Asia Tenggara mencapai 25% pada tahun 2018. Angka ini menempatkan wilayah tersebut pada peringkat kelima tertinggi

<sup>1</sup> Rahayu. (2021). Gambaran Stunting Pada Balita Indonesia. *Literatur Review*, 8.

<sup>2</sup> LPPM STIKES Hang Tuah Pekanbaru. (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah. *Itra*, Permasalahan Anak Pendek (Stunting) Dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting, 6.

10 setelah Oseania, Afrika Timur, Asia Selatan, serta Afrika Tengah dan Barat pada tahun yang sama. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG), 51 prevalensi stunting merupakan masalah gizi yang paling tinggi dibandingkan dengan masalah lainnya, seperti gizi kurang, kurus, dan obesitas<sup>3</sup>.

51 Data dari Pemantauan Status Gizi menunjukkan bahwa stunting adalah masalah gizi yang paling prevalen dibandingkan dengan masalah lain seperti gizi kurang, kurus, dan obesitas, menyoroti betapa seriusnya isu ini dalam konteks kesehatan anak di wilayah tersebut.

117 Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga merupakan masalah pembangunan global yang memerlukan aksi bersama lintas sektor dan negara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh komunitas internasional. Dengan fokus pada intervensi yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi angka stunting secara signifikan di masa depan.

149 Masalah gizi stunting (balita pendek) merupakan isu serius, terutama di negara-negara miskin dan berkembang<sup>4</sup>. Stunting adalah kondisi di mana balita mengalami kegagalan dalam pertumbuhan, yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari awal kehamilan hingga usia 4 24 bulan. Kekurangan gizi pada tahap awal perkembangan anak dapat menghambat pertumbuhan fisik, meningkatkan risiko penyakit, dan

10  
19 <sup>3</sup>Nurnyingsih Syam. (2021). Komitmen Politik dalam Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten Indonesia. Universitas Gajah Mada, 1.

<sup>4</sup> Rifiana, A. J., & Agustina, L. (2018). Analisis kejadian stunting pada balita di desa pasirdoton kecamatan cidahu kabupaten sukabumi provinsi jawa barat tahun 2017-2018. *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya*, 4(2).

mengganggu perkembangan mental, bahkan dapat berujung pada kematian. Anak-anak yang mengalami stunting berisiko mengalami <sup>4</sup> penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, serta meningkatkan kemungkinan terkena penyakit degeneratif di masa depan<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Program percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia sejak tahun 2018, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2021). Melalui program ini, angka stunting berhasil diturunkan menjadi 24,4%, dari 30,8% pada tahun 2018. Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024<sup>6</sup>.

Penelitian ini menarik dalam konteks politik karena menyoroti peran strategis perempuan dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat. Partisipasi aktif anggota DPRD perempuan menjadi pusat perhatian, <sup>140</sup> karena mereka dapat membawa perspektif yang unik dan sensitif terhadap isu-isu sosial dan kesehatan yang mempengaruhi masyarakat. Fokus pada Komisi D DPRD Jawa Timur juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika internal lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan publik. Ini termasuk proses negosiasi politik, kolaborasi antaranggota, dan cara berbagai kepentingan lokal direpresentasikan dalam proses pengambilan keputusan.

<sup>5</sup> Dafriadi. IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING. *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR*, 14. (2021)

<sup>6</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022, Januari 15). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2023-2027. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://www.setneg.go.id/rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2023-2027>

Lebih dari sekadar merumuskan kebijakan, penelitian ini juga mengungkapkan pengaruh nyata dari kebijakan publik yang dihasilkan oleh anggota DPRD perempuan dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, perbaikan gizi, dan kesadaran masyarakat tentang stunting di Surabaya. Selain itu, penelitian ini memperkaya narasi tentang peran advokasi dan pemberdayaan perempuan dalam politik lokal, menunjukkan bagaimana inklusi gender dapat memperkuat proses kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat<sup>7</sup>.

Inklusi gender dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Dengan melibatkan perspektif gender dalam perencanaan kebijakan, setiap kelompok dalam masyarakat—baik laki-laki maupun perempuan—dapat memiliki representasi yang seimbang dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya memperluas cakupan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelaksanaan program pembangunan. Ketika perempuan mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat dasar sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Penghapusan ketimpangan gender juga menjadi fokus utama dalam inklusi gender. Melalui kebijakan yang inklusif, upaya untuk mengatasi

<sup>7</sup> Adeni, S., & Harahap, M. A. (2018). Komunikasi politik dan keterwakilan perempuan dalam arena politik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 1(2).

ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, pendapatan, dan partisipasi politik dapat ditingkatkan. Hal ini penting karena ketimpangan gender tidak hanya menghambat potensi individu, tetapi juga mengurangi efektivitas pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengakomodasi kebutuhan dan kontribusi baik laki-laki maupun perempuan dalam kebijakan, masyarakat dapat mengoptimalkan sumber daya manusia secara menyeluruh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, anggota DPRD perempuan mendorong untuk memperluas cakupan layanan kesehatan yang lebih merata, termasuk di daerah-daerah yang terpinggirkan. Mereka memastikan bahwa program-program pemerintah terfokus pada memperbaiki gizi anak dan menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi masyarakat untuk mengatasi stunting. Dengan memperhatikan aspek gender dalam setiap inisiatif mereka, anggota DPRD perempuan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan, khususnya dalam konteks peran ibu dalam pemberian makan anak dan perawatan gizi, diakomodasi secara memadai dalam kebijakan kesehatan yang mereka ajukan.

Para anggota DPRD perempuan tidak hanya bekerja untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif secara gender, tetapi juga menjadi suara bagi perempuan-perempuan di masyarakat yang sering kali tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menggunakan posisi dan pengaruh politik mereka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, memperbaiki

kondisi sosial dan kesehatan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan perspektif gender secara menyeluruh.

<sup>108</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang substansial dalam pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat di tingkat daerah. Sebagai badan legislatif, DPRD bertanggung jawab untuk mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur berbagai aspek kesehatan, seperti pendanaan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, standar pelayanan kesehatan, dan program-program spesifik seperti pencegahan stunting. Melalui pembentukan Perda, DPRD tidak hanya menetapkan landasan hukum bagi penyelenggaraan kesehatan di daerah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

<sup>80</sup> Selain itu, DPRD terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup alokasi dana untuk sektor kesehatan. Pengalokasian anggaran ini penting untuk mendukung program-program prioritas seperti program gizi, imunisasi, dan peningkatan infrastruktur kesehatan. DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kesehatan yang telah disetujui.

<sup>109</sup> DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran yang substansial dalam perencanaan dan penganggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait dengan sektor kesehatan. Melalui proses penganggaran ini, DPRD menetapkan alokasi dana yang strategis untuk mendukung berbagai program kesehatan masyarakat yang

menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan stunting dan masalah kesehatan lainnya.

DPRD terlibat dalam penyusunan APBD, yang mencakup alokasi dana untuk sektor kesehatan. Proses ini melibatkan pembahasan antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap program kesehatan mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Penganggaran ini tidak hanya mencakup dana untuk program gizi dan imunisasi, tetapi juga untuk infrastruktur kesehatan seperti pembangunan dan perawatan fasilitas kesehatan.

Anggaran yang dialokasikan oleh DPRD di dalam APBD digunakan untuk mendukung berbagai program kesehatan masyarakat, termasuk program gizi untuk meningkatkan status gizi anak dan program imunisasi untuk mencegah penyakit menular. Dukungan finansial ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Selain peran dalam penganggaran, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kesehatan yang telah disetujui. Melalui mekanisme ini, DPRD memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan transparan. Mereka melakukan evaluasi terhadap capaian program-program kesehatan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

Dengan melakukan monitoring rutin, DPRD dapat memastikan bahwa program-program kesehatan berjalan efektif dan memberikan dampak positif

bagi masyarakat. Kolaborasi dengan dinas kesehatan daerah, rumah sakit, dan lembaga non-pemerintah juga menjadi bagian integral dari peran DPRD dalam memastikan keberhasilan kebijakan kesehatan. Secara keseluruhan, pendekatan legislatif DPRD dalam pengaturan kesehatan masyarakat mencerminkan komitmen mereka untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, akses yang adil, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Surabaya, yang merupakan kota atau kabupaten dengan kasus stunting tertinggi ke-6 di Jawa Timur, memiliki persentase 28.90%, masih di atas rata-rata Jawa Timur, yaitu 23.50% (SSGI, 2021). Kota ini terus berusaha untuk mengatasi stunting di tingkat kota. Pada bulan Juli 2022, Surabaya memiliki 6.722 kasus stunting aktif<sup>8</sup>. Dinas kesehatan, sosial, pendidikan, ketahanan pangan dan pertanian, perencanaan daerah, kependudukan dan pencatatan sipil, sumber daya air dan bina marga, kebersihan dan ruang terbuka hijau, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman adalah bagian dari dinas kota Surabaya (OPD)<sup>9</sup>. Salah satu dasar hukum terbaru adalah adanya Peraturan Walikota nomor 69 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya serta Surat Keterangan Walikota tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya Tahun 2022<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Pemerintah Kota Surabaya. (2022, Mei). Kasus Stunting di Surabaya Tinggal 16 Persen. Wali Kota Eri Optimis Segera Zero Stunting. Pemerintah Kota Surabaya, dari <https://www.surabaya.go.id/id/berita/79694/kasus-stunting-di-surabaya-tinggal-16-persen-wali-kota-eri-optimis-segera-zero-stunting>

<sup>9</sup> Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. (2022). Tentang percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya

<sup>10</sup> Peraturan Walikota Surabaya No. 79/2022. (2022). Tentang percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya.

<sup>1</sup> Analisis situasi berdasarkan data kelurahan dan kecamatan, penghitungan anggaran untuk kegiatan, pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, dan pembinaan kader Surabaya Hebat adalah beberapa program yang terus dilaksanakan oleh Kota Surabaya. <sup>1</sup> Kader melakukan pendataan kesehatan warga, melakukan lomba Generasi Emas untuk menghilangkan stunting, melakukan survei melalui aplikasi Sayang Warga, membantu ibu menyusui dan pemenuhan gizi anak, memberikan bimbingan sebelum menikah, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengatasi stunting<sup>11</sup>.

Untuk mengurangi angka stunting di Surabaya, pemerintah kota telah melakukan berbagai program dan inisiatif. Pada tahun 2022, angka stunting berhasil menurun menjadi 6,722 anak dibandingkan dengan 12,788 anak pada tahun 2021. Meskipun ada penurunan, angka tersebut masih di atas target “Zero Stunting” yang diinginkan oleh Walikota Surabaya<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Penelitian ini merupakan bagian dari Program Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi di Jawa Timur bekerjasama dengan BKKBN. Program ini berfokus pada lima pilar utama: peningkatan komitmen kepala daerah untuk menurunkan stunting; penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, dan riset; perubahan perilaku dan

<sup>11</sup> Pemerintah Kota Surabaya. (882, Februari 10). Pemkot Surabaya Dinilai Layak Jadi Pioner Pencegahan Stunting di Jatim. Pemerintah Kota Surabaya, dari <https://surabaya.go.id/id/berita/68822/pemkot-surabaya-dinilai-layak-j>

<sup>12</sup> *IBID*

<sup>1</sup> pengembangan media edukasi; pengembangan lingkungan sehat dan layanan pranikah dan suplementa; dan pengembangan layanan kesehatan<sup>13</sup>.

Studi ini <sup>1</sup> dilakukan di Kota Surabaya dengan kolaborasi dinas terkait pemerintah kota. Fokus penelitian adalah untuk memahami kondisi di kelurahan yang ditetapkan sebagai <sup>1</sup> lokasi stunting pada tahun 2022 oleh pemerintah kota Surabaya. <sup>5</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang faktor pendukung dan <sup>1</sup> protektif serta faktor resiko atau penghambat yang terlibat dalam program penanganan stunting di kota Surabaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang dapat diterapkan oleh berbagai sektor yang terkait untuk mempercepat penurunan stunting.

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Surabaya tidak hanya melibatkan pemerintah kota, tetapi juga melibatkan <sup>110</sup> kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga masyarakat sipil. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung upaya pemerintah untuk menyediakan layanan <sup>138</sup> kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat kota. Dengan pendekatan yang holistik dan <sup>132</sup> terkoordinasi, diharapkan bahwa Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mengatasi masalah stunting dan memastikan setiap anak memiliki akses yang adil terhadap gizi yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangannya.

<sup>1</sup>  
<sup>13</sup> Surjaningrumet al, & Media Gizi Indonesia. (2022). PETA POTENSI PENGENTASAN STUNTING DI KOTA SURABAYA. Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal), SP(1), 97–103.

Menyoroti peran krusial perempuan dalam pembentukan kebijakan publik yang efektif terkait stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Surabaya, memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan termasuk anggota DPRD. Keterlibatan anggota DPRD, terutama melalui Komisi D yang bertanggung jawab atas masalah kesehatan dan sosial, menjadi penting dalam merumuskan dan merancang kebijakan yang tepat guna untuk menanggulangi stunting. Penelitian ini penting karena kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD berpotensi memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan akses terhadap nutrisi dan layanan kesehatan masyarakat, serta mengurangi angka stunting di kota ini. Analisis mendalam terhadap proses politik dan keputusan yang dihasilkan oleh anggota DPRD perempuan dalam konteks ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana peran politik lokal dapat menjadi pendorong utama dalam perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Anggota DPRD perempuan membawa perspektif yang unik terkait dengan isu-isu gender dalam konteks kesehatan anak dan gizi, yang sering kali tidak terwakili dengan baik dalam kebijakan yang ada. Mereka mendorong untuk memasukkan aspek-aspek seperti kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan, pentingnya nutrisi yang tepat bagi anak-anak, serta perlunya dukungan yang lebih besar terhadap peran ibu dalam perawatan dan pemulihan anak yang menderita stunting.

Anggota DPRD perempuan membawa perspektif yang penting terkait dengan isu-isu gender dalam konteks kesehatan anak dan gizi. Mereka sering

kali lebih peka terhadap ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan antara laki-laki dan perempuan, serta pentingnya memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang setara terhadap nutrisi yang memadai.

Dalam konteks stunting, anggota DPRD perempuan mendorong untuk memprioritaskan program-program yang tidak hanya mengatasi kekurangan gizi pada anak, tetapi juga mendukung peran ibu dalam memberikan perawatan dan dukungan yang diperlukan bagi pemulihan anak yang menderita stunting. Mereka memperjuangkan kebijakan yang tidak hanya menangani akar masalah gizi buruk pada anak, tetapi juga mengakui peran kunci perempuan dalam keluarga dan masyarakat dalam memastikan anak-anak tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Dengan memasukkan perspektif ini dalam pembuatan kebijakan, anggota DPRD perempuan berkontribusi pada kebijakan yang lebih holistik dan sensitif terhadap isu gender serta kesehatan anak dalam upaya menjadikan Surabaya bebas dari stunting.

Peran aktif anggota DPRD perempuan dalam Komisi D juga memperkuat agenda politik lokal dengan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap perempuan dan anak-anak secara lebih luas, bukan hanya sebagai penerima layanan tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang memiliki kepentingan dan pengalaman langsung terhadap isu-isu tersebut. Dengan demikian, keterlibatan mereka tidak hanya membawa perspektif gender yang lebih inklusif, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam upaya penanganan stunting dan meningkatkan kesehatan anak di Surabaya.

103 Melalui penelitian ini, diharapkan dapat lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penurunan stunting di Kota Surabaya serta memberikan masukan yang berguna untuk strategi yang lebih efektif dalam mengatasi stunting di masa depan.

## 16 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanganan stunting yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan dan instansi pemerintah terkait di Surabaya dalam mengatasi stunting di Surabaya?
2. Bagaimanakah keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam upaya penanggulangan stunting di Surabaya? 16

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penanganan stunting yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan dan instansi pemerintah kota Surabaya
2. Untuk mengetahui keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam upaya penanggulangan stunting di Surabaya

25

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah bagi semua pihak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terutama bagi komisi D yang menjadi pelaksana di lapangan.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

#### 1.5 Tinjauan Pustaka

9

##### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil	Penelitian ini
1.	Endang Retno Yaningrum (2022)	Peta Potensi Pengentasan Stunting di Kota Surabaya	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	1. rdapat beberapa hal yang berbeda dari temuan penelitian ini, tetapi hasilnya telah dievaluasi secara sistematis (systematic review) oleh Fitri dkk. (2022) tentang program pencegahan stunting di Indonesia. Fitri dkk. menemukan bahwa beberapa masalah yang ditemui di lapangan adalah kurangnya dana	Persamaan : - Membahas pencegahan stunting di Surabaya.  Perbedaan : - Faktor penghambat dan Faktor pendukung

				<p>12</p> <p>khusus, jumlah tenaga kerja dan tenaga gizi yang terbatas, kurangnya perencanaan yang tepat, kurangnya Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang rinci, dan kurangnya skema pencatatan dan pelaporan (Fitri J., Huljannah, &amp; Achmah, 2022). Sebagai kota atau kabupaten dengan tingkat stunting tertinggi ke-6 di Jawa Timur, Surabaya telah berkomitmen untuk mengurangi angka stunting.</p>	
2	Idham Chabliq (2020)	Pencegahan Stunting di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	<p>Penelitian ini berhasil bertujuan dan menghasilkan Pemahaman stunting: Peserta dan kader memahami penyebab, dampak, dan intervensi untuk stunting. Modifikasi makanan sehat: Peserta dan kader membuat 3 menu kudapan sehat tinggi zinc untuk anak stunting. Penggunaan KMS: Peserta dan kader mengisi KMS dan mengukur pertumbuhan anak dengan tepat. Identifikasi stunting: Peserta dan kader mengenali anak-anak dengan risiko stunting. Program ini berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Medokan Semampir, Surabaya.</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan Organisasi masyarakat.</li> </ul> <p>Perbedaan : Subjek penelitian yang sedikit berbeda</p>

3	Ari Susanti (2019)	123 Analisis Faktor Balita Stunting di Banyu Urip Surabaya	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stunting pada balita di Banyu Urip, Surabaya adalah berat badan lahir, kolo 34 n, dan imunisasi. Di antara faktor-faktor tersebut, imunisasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap stunting. Kelengkapan imunisasi pada balita menjadi tanggung jawab keluarga, terutama ibu. Penting bagi ibu untuk mengetahui jadwal imunisasi dan secara rutin mengikuti kegiatan posyandu serta memiliki sikap yang peduli terhadap kesehatan balitanya. Peran aktif petugas puskesmas dan kader juga sangat penting dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada balita. Kolaborasi antara petugas kesehatan dan ibu balita diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program imunisasi serta memberikan manfaat penting untuk daya tahan tubuh balita. Daya tahan tubuh yang optimal dapat mengurangi risiko terjadinya stunting.	Persamaan : Kolaborasi Organisasi masyarakat  Perbedaan : Subjek Penelitian yang sedikit berbeda.
---	--------------------	---	--	---	---

Sumber: Analisis peneliti dari judul-judul jurnal yang ada dibawah

Commented [X1]: Tambahkan sumbernya

Commented [A2R1]:

Endang Retno Suryaningrum dalam penelitiannya sama-sama membahas tentang program pencegahan stunting di Indonesia, terdapat perbedaan signifikan dalam identifikasi faktor penghambat dan pendukung. Penelitian Endang Retno menyoroti potensi pengentasan stunting di Surabaya dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menyoroti upaya dan potensi yang ada dalam konteks lokal. Di sisi lain, Fitri dkk. melalui systematic review mereka menunjukkan bahwa kendala yang signifikan di lapangan termasuk kurangnya dana khusus, keterbatasan sumber daya manusia, dan permasalahan terkait SOP, perencanaan, serta pencatatan dan pelaporan yang belum terstruktur dengan baik. Meskipun Surabaya telah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting, tantangan yang dihadapi seperti yang diidentifikasi oleh Fitri dkk. perlu diatasi agar program-program pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan tujuan pengentasan stunting yang telah ditetapkan.

Studi Idham Choliq melalui penelitiannya di Medokan Semampir, Surabaya, menggambarkan upaya pencegahan stunting melalui modifikasi makanan pada anak dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berhasil menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang stunting di kalangan peserta dan kader masyarakat, termasuk pemahaman akan penyebab, dampak, dan intervensi yang diperlukan. Melalui program ini, peserta dan kader aktif terlibat dalam pembuatan 3 menu kudapan sehat yang kaya akan zinc, yang dirancang khusus untuk anak-anak stunting. Selain itu, mereka juga menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk mengisi dan mengukur

pertumbuhan anak dengan akurat, serta mengidentifikasi anak-anak yang berisiko stunting. Studi ini menunjukkan bahwa melalui keterlibatan aktif organisasi masyarakat, seperti yang ditunjukkan di Medokan Semampir, Surabaya, dapat dilakukan upaya konkret untuk menurunkan angka stunting di tingkat komunitas dengan memfokuskan pada modifikasi makanan dan peningkatan pemantauan kesehatan anak.

Studi yang dilakukan oleh Ari Susanti di Banyu Urip, Surabaya, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi stunting pada balita. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap stunting, termasuk berat badan lahir rendah, pemberian kolostrum, dan kelengkapan imunisasi pada balita. Di antara faktor-faktor tersebut, imunisasi terbukti menjadi faktor yang paling signifikan dalam pengurangan risiko stunting pada balita. Tanggung jawab untuk memastikan kelengkapan imunisasi pada balita sebagian besar terletak pada keluarga, khususnya ibu. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk memahami jadwal imunisasi yang tepat dan secara rutin mengikuti kegiatan Posyandu serta menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan balitanya. Peran aktif petugas puskesmas dan kader juga menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada balita. Kolaborasi yang baik antara petugas kesehatan dan ibu balita diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program imunisasi dan secara keseluruhan memberikan manfaat signifikan untuk memperkuat daya tahan

tubuh balita, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya stunting secara efektif.

## 1.5.2 Konsep Teori

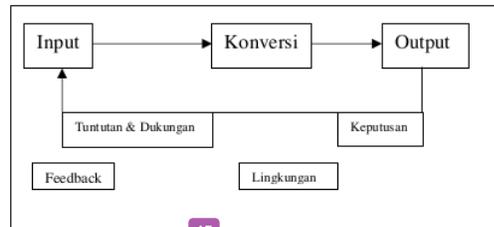
### 1.5.2.1 Teori Sistem

Menurut teori sistem David Easton, sistem politik terdiri dari sistem interaksi yang ada di setiap masyarakat dan di mana alokasi yang mengikat atau otoritas diterapkan<sup>14</sup>. Menurut Easton, kehidupan politik terdiri dari berbagai aktivitas yang berhubungan satu sama lain. Dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi cara membuat dan menerapkan keputusan otoritatif, ia menemukan hubungan atau hubungan sistemiknya. Jika kehidupan politik dilihat sebagai sistem aktivitas, ada dampak tertentu dari cara menganalisis bagaimana sistem itu berfungsi<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Bahri, S. (2023). Implikasi Kebijakan Pembangunan pada Sektor Pariwisata di Pasar Kamu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Studi Pembangunan*, 2(2)

<sup>15</sup> Lince Magriasti. ARTI PENTING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH: ANALISIS DENGAN TEORI SISTEM DAVID EASTON. ARTI PENTING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH: ANALISIS DENGAN TEORI SISTEM DAVID EASTON, 3. (2011)

Tabel 2 Teori Sistem David Easton



Sumber : Sistem Politik David Easton

Menurut David Easton, sistem politik dapat dianggap sebagai keseluruhan struktur politik yang terdiri dari berbagai elemen yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap fenomena politik, menggantikan pendekatan klasik yang hanya fokus pada negara dan kekuasaan<sup>16</sup>.

Profesor David Easton adalah mantan Presiden American Political Science Association, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden American Academy of Arts and Sciences, dan sangat tertarik mengembangkan pendekatan analisis sistem sebagai cara sentral untuk memahami bagaimana sistem politik beroperasi.<sup>17</sup>

Belakangan ini, beliau beralih ke hambatan struktural sebagai elemen utama kedua yang mendasari sistem politik. Easton baru-baru ini

35

<sup>16</sup> Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia

<sup>17</sup> UCI Faculty Profile System. (2009). David Easton. Diakses pada 2 Juli 2024, dari <https://faculty.uci.edu/profile/?facultyId=2547>

menyelesaikan sebuah buku tentang pengaruh struktur politik terhadap berbagai aspek kehidupan politik. Profesor Easton juga telah menulis secara luas tentang negara dan perkembangan ilmu politik serta tentang sosialisasi politik untuk anak-anak. Proyek terbarunya mengenai perkembangan ilmu sosial di China telah membawa hubungan pertukaran antara UCI dengan Universitas Beijing dan Chinese Academy of Social Sciences, yang mencerminkan minat kampus yang berkembang terhadap Asia Pasifik.

Proyek lainnya, melalui <sup>89</sup> **International Committee for the Study of the Development of Political Science** (yang ia inisiasi dan pimpin), melibatkan upaya kolektif ilmuwan politik dari berbagai negara untuk menjelajahi kondisi dan perkembangan ilmu politik secara global saat ini. Beliau juga terlibat dalam sebuah proyek yang menyelidiki efek variasi dalam struktur dan organisasi sistem politik demokratis terhadap efektivitas kebijakan publik mereka. Profesor Easton mengajar mata kuliah tentang teori politik empiris, analisis sistem politik, dasar-dasar ilmu politik modern, dan analisis struktural politik.

Dalam teori sistem David Easton, input dan output memainkan peran krusial dalam menjelaskan dinamika sistem politik sebuah negara. Input, yang mencakup permintaan masyarakat terhadap kebijakan, dukungan politik, sumber daya seperti uang dan informasi, serta kepentingan individu atau kelompok, berfungsi sebagai stimulus utama bagi proses politik. Tanpa <sup>38</sup> **input yang rutin, tetap, dan ajeg, sistem politik tidak dapat**

berfungsi secara efektif karena keputusan politik dan arah kebijakan tidak akan didorong oleh informasi dan dorongan yang diperlukan.

Di sisi lain, output dalam konteks ini mengacu pada hasil atau produk dari proses politik yang merespons input yang masuk. Hal ini mencakup kebijakan yang diimplementasikan, keputusan politik, dan dampaknya terhadap masyarakat. Output menjadi penting karena sebagai mekanisme umpan balik, ia memungkinkan evaluasi terhadap kinerja sistem politik dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Tanpa output yang jelas, tidak ada cara untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik, sehingga **input dan output** saling melengkapi **dalam** menjaga **fungsi dan keberlanjutan sistem politik** dalam sebuah negara<sup>18</sup>.

Hanya otoritas negara yang diakui dalam konteks otoritas politik, menurut David Easton. Dalam mekanisme output, hanya lembaga yang memiliki otoritas formal yang dapat membuat keputusan dan bertindak. Menurut Easton, tindakan politik yang sah dan sah sangat penting bagi negara karena memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterima secara luas dan dipatuhi oleh semua orang. Hal ini penting karena keputusan yang mengikat harus dibuat oleh pemerintah yang diakui oleh konstitusi.

Lingkungan, menurut teori David Easton, mencakup **semua sistem, baik fisik maupun sosial, yang tidak termasuk dalam sistem politik.**

---

<sup>18</sup> *IBID*

Terdapat dua bagian lingkungan: intrasocietal dan extrasocietal. Yang pertama adalah bagian dari sistem politik dan mencakup berbagai tingkah laku, sikap, kepribadian, dan gagasan yang ada dalam lingkungan ekonomi, budaya, dan struktur sosial. Bagian ini merupakan segmen fungsional dari masyarakat. Sementara itu, extrasocietal mencakup semua sistem yang tidak termasuk dalam sistem politik dan merupakan komponen fungsional dari masyarakat internasional atau supranasi<sup>19</sup>.

Tekanan atau gangguan dari lingkungan terhadap sistem politik dapat muncul, seperti krisis ekonomi, yang harus diatasi oleh sistem politik. Sistem politik harus menjalankan variabel-variabel penting untuk mengatasi tekanan. Nilai didistribusikan kepada anggota sistem dan diatur supaya sebagian besar anggota masyarakat menerima distribusi ini.

Menurut Easton, empat sistem utama membentuk lingkungan masyarakat: ekologi, biologi, kepribadian, dan sosial. Setiap sistem ini berkontribusi dalam mempengaruhi dinamika dan kestabilan sistem politik dalam menghadapi tantangan dari lingkungan eksternal maupun internal.

David Easton mengatakan bahwa setelah tuntutan dan dukungan diproses dalam sistem politik, hasilnya disebut output. Output ini terdiri dari dua komponen utama: keputusan (decision) dan tindakan (action). Pada tahap berikutnya, output ini akan menghasilkan umpan balik (feedback), yang berasal dari aktor dalam sistem politik dan dari lingkungan eksternal. Respon ini akan ditafsirkan kembali sebagai

---

<sup>19</sup> Pribadi, T., Muhyidin, A., & Susanti, D. (2024). Modul 1: Pendekatan Analisis Sistem Politik

tuntutan dan dukungan, yang akan berdampak pada bagaimana sistem politik beroperasi secara keseluruhan. Proses ini berlangsung secara siklus, mencerminkan dinamika interaksi antara sistem politik dengan lingkungannya<sup>20</sup>.

Teori sistem adalah sebuah sistem interdependensi, artinya perubahan di satu bagian akan memengaruhi bagian lainnya. Beberapa orang sangat penting bagi sistem dan lingkungan yang mewadahnya. Sistem politik menerima input dari tuntutan masyarakat dan dukungan lingkungan. Ini mencakup permintaan masyarakat terhadap berbagai masalah lingkungan. Sumber energi yang menggerakkan sistem adalah masukan dari komponen lain. Sistem politik mengubah input ini menjadi kebijakan yang memiliki kekuatan hukum. Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak signifikan baik terhadap struktur dan fungsi sistem politik maupun terhadap masyarakat dan lingkungannya<sup>21</sup>.

Setelah berbagai tuntutan masuk ke dalam sistem politik, keputusan atau tindakan yang akan diterapkan di lingkungan dihasilkan. Ada umpan balik atau timbal balik setelah keputusan menjadi tindakan yang harus dilakukan. Umpan balik ini menjadi referensi untuk evaluasi input, dan kemudian menjadi tuntutan baru dalam sistem politik<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> 35 49 Sora, S. (2013). Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia

<sup>21</sup> Magriasti, L. (2011). RTI penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah: Analisis dengan teori Sistem David Easton. Dalam Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 (hal. 252-258). Banten: LANE FISIP Untirta.

<sup>22</sup> Siba, M. A. M. (2021). Governance of Local Government of West Kalimantan Against Illegal Logging. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(1), 129-142

Kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang diambil dalam sistem politik. Tidak peduli apakah masyarakat mendukung proses pembuatan kebijakan. Proses pembentukan kebijakan adalah bagian integral dari upaya individu atau kelompok tertentu untuk memengaruhi para pengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka sendiri. Kebijakan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen, proses, alokasi, sumber daya, aktor, dan kekuatan. Kehidupan politik adalah sistem dari aktivitas yang saling terkait yang memengaruhi pengambilan keputusan yang bijak<sup>23</sup>.

Teori Sistem David Easton dapat memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami proses pembuatan kebijakan terkait stunting di Surabaya. Teori ini menekankan pentingnya melihat kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara input, konversi, output, dan umpan balik dalam suatu sistem politik<sup>24</sup>. Dengan melihat proses pembuatan kebijakan dari sudut pandang teori sistem, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dan bagaimana hal-hal tersebut berdampak pada respons dan pelaksanaan terkait kebijakan.

David Easton mengembangkan konsep "input-output system" yang mencakup peran legislator dalam menghubungkan kebutuhan dan tuntutan

<sup>23</sup> Senjaya, I. W. (2017). Kebijakan Publik Perlindungan Pertanian di Kabupaten Batang: Analisis Teori David Easton. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 8-36-32

<sup>24</sup> Alianti, T. Y., Erawan, I. K. P., & Erviantono, T. (2024). THE APPLICATION OF DAVID EASTON SYSTEM THEORY 36 THE POLICY-MAKING PROCESS OF USING FOREIGN WORKERS IN INDONESIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(6), 93-95

masyarakat dengan proses pembuatan keputusan politik. Menurutnya, legislator bertindak sebagai pemroses dan penyaring dalam menerima masukan dari masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang responsif<sup>25</sup>.

Menurut David Easton, sistem politik memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari sistem sosial lainnya. Pertama, sistem politik terdiri dari unit seperti aksi-aksi politik dan kelompok politik, yang berfokus pada kekuasaan politik dalam masyarakat. Kedua, sistem politik memiliki batas yang jelas, membedakannya dari lingkungannya dengan menentukan elemen-elemen <sup>71</sup> tindakan yang terkait dengan pengambilan keputusan otoritatif bagi masyarakat. Input dan output sistem politik sangat penting untuk menjaga sistem berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Input kontinu dari masyarakat diperlukan agar sistem politik dapat berfungsi dengan baik, sementara output membantu mengidentifikasi hasil kerjanya.

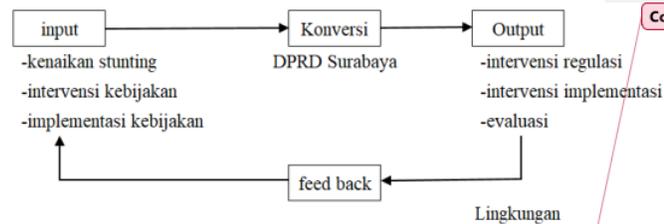
<sup>17</sup> Dalam konteks diferensiasi, unit-unit sistem politik melakukan aktivitas yang berbeda pada waktu yang sama. Ini memungkinkan sistem untuk berfungsi dengan baik. Integrasi sistem politik menjadi krusial untuk memastikan bahwa aktivitas yang berbeda tersebut diartikulasikan dengan minimalisasi konflik, dan untuk tujuan ini, sistem harus memiliki mekanisme yang memungkinkan anggotanya bekerja sama dan bekerja sama dalam mengambil keputusan yang mengikat.

---

<sup>25</sup> Sumber : Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia oleh Muhammad YGG Seran, Drs, M.Si melalui <https://slideplayer.info/slide/13769038>

Konteks dalam penelitian yang dilakukan ini, konsep dan teori sistem yang digunakan tergambar dalam bagan berikut:

**Gambar 1 Konsep dan Teori Sistem Penanggulangan Stunting di Kota Surabaya**



Commented [X3]: Dipakai unt kerangka analisa

Sumber : Hasil Analisa Peneliti

Dalam konteks penanggulangan stunting di Kota Surabaya, konsep dan teori sistem dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka input-proses-output-feedback yang komprehensif. Data mengenai peningkatan prevalensi stunting di wilayah tersebut adalah input pertama, yang membantu pemerintah daerah membuat tindakan kebijakan yang efektif. Intervensi ini meliputi berbagai program seperti peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, distribusi suplemen gizi, serta langkah-langkah untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Proses berlanjut pada konversi di DPRD Kota Surabaya, di mana perumusan kebijakan dilakukan melalui dialog dan pembahasan antara anggota DPRD serta pemangku kepentingan terkait. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat akan memenuhi kebutuhan lokal dan membantu menurunkan angka stunting di Kota Surabaya secara berkelanjutan. Proses legislative ini menghasilkan output berupa regulasi-regulasi baru atau

revisi peraturan yang mendukung penanggulangan stunting, seperti peningkatan standar gizi dalam pangan lokal atau alokasi anggaran untuk program kesehatan.

Selanjutnya, output tersebut diimplementasikan secara nyata di masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kader kesehatan, kampanye gizi, dan distribusi makanan tambahan. Evaluasi terhadap implementasi dilakukan secara berkala untuk menilai dampak kebijakan terhadap penurunan prevalensi stunting dan kesehatan masyarakat secara umum. Evaluasi ini mencakup pengukuran indikator kesehatan seperti tingkat pertumbuhan anak, akses pelayanan kesehatan, dan pengetahuan gizi masyarakat.

Feedback dari masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi aktif dalam program-program tersebut maupun melalui survei dan penelitian terkait, menjadi penting untuk menyesuaikan kebijakan ke depan. Informasi yang diperoleh dari feedback ini kemudian menjadi input baru dalam siklus kebijakan, memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian strategis, perbaikan program, atau bahkan pengembangan kebijakan baru yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan stunting di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pendekatan input-proses-output-feedback dalam konsep dan teori sistem ini mencerminkan siklus yang berkelanjutan dan adaptif dalam pengembangan kebijakan publik. Hal ini tidak hanya memastikan kesuksesan implementasi program penanggulangan stunting, tetapi juga

meningkatkan partisipasi masyarakat serta responsivitas kebijakan terhadap perubahan yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks penanggulangan stunting di Kota Surabaya, konsep dan teori sistem yang melibatkan siklus input-proses-output-feedback menunjukkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengembangan kebijakan publik. Input berupa data tentang prevalensi stunting dan intervensi kebijakan menjadi dasar bagi proses perumusan kebijakan di DPRD Kota Surabaya. Proses ini menghasilkan output berupa regulasi baru dan implementasi program-program kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Implementasi kebijakan dilakukan dengan memanfaatkan hasil output, seperti distribusi suplemen gizi, edukasi gizi, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Evaluasi terus-menerus terhadap implementasi ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam menurunkan angka stunting dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Feedback dari masyarakat menjadi penting dalam menyesuaikan kebijakan ke depan, yang kemudian kembali menjadi input baru untuk siklus kebijakan selanjutnya. Pendekatan ini tidak hanya memastikan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penanggulangan stunting. Dengan demikian, konsep dan teori sistem dalam konteks ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan adaptif dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan di tingkat lokal.

### 1.5.2.2 <sup>47</sup> Stunting

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh infeksi dan kekurangan gizi yang berkelanjutan. <sup>144</sup> Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan kesehatan pemerintah menetapkan tinggi badan anak yang di bawah standar. Kementerian Kesehatan membuat definisi bahwa anak dikategorikan stunting jika nilai z-scorenya kurang dari -2.00 SD (stunted) atau kurang dari -3.00 SD (sangat stunted). <sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, stunting adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak yang mengalami kekurangan gizi yang berkelanjutan selama masa pertumbuhan mereka. Anak stunting mungkin terlihat proporsional, tetapi mereka akan lebih pendek atau kerdil jika dibandingkan dengan teman sebaya yang sehat. <sup>121</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar kurva pertumbuhan untuk anak yang didiagnosis stunting. <sup>6</sup> Stunting masih menjadi masalah gizi terbesar di Indonesia. Sebagai hasil dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan pada tahun 2022, tingkat stunting di Indonesia mencapai 21,6%<sup>26</sup>.

Stunting, atau gangguan pertumbuhan pada anak, <sup>133</sup> disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah pengetahuan yang kurang baik

<sup>6</sup> <sup>26</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Menteri Kesehatan Republik Indonesia Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. 1-7. <https://monalisa.bkkbn.go.id/downloadinfo/23>

seputar kesehatan dan gizi, terutama selama kehamilan dan masa awal kehidupan anak. Banyak ibu yang tidak mempraktikkan praktik ASI eksklusif, dan sebagian besar anak tidak mendapatkan makanan pendamping ASI yang sesuai. Faktor lainnya meliputi akses terbatas ke makanan bergizi, seperti prevalensi anemia pada ibu hamil dan persepsi bahwa makanan bergizi mahal. Layanan kesehatan yang terbatas juga menjadi kendala, seperti rendahnya cakupan ANC, pos natal, dan edukasi dini untuk anak. Terakhir, sebagian rumah tangga masih menggunakan buang air terbuka meskipun tidak memiliki akses yang memadai ke air minum bersih, yang memperburuk masalah ini.<sup>27</sup>

Proses terjadinya stunting dimulai dari kondisi gizi buruk pada remaja yang menjadi ibu, ditambah dengan kekurangan asupan gizi saat hamil dan lingkungan yang kurang sanitasi. Upaya pencegahan stunting sangat penting dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan, seperti gangguan perkembangan otak yang berpotensi menurunkan kecerdasan anak serta meningkatkan risiko terhadap penyakit. Pencegahan ini juga krusial untuk mengamankan kualitas sumber daya manusia di masa depan, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

---

<sup>27</sup> Dewi, K., Anggriani, L., Ritonga, M. P., Azmi, C., Samosir, S. R., & Hutaaruk, F. N. (2023). Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 18-26.

## 1.6 Metodologi Penelitian<sup>76</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan ini mengarahkan penelitian untuk memeriksa atau menggambarkan situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, adalah prosedur yang mengumpulkan data deskriptif dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berkonsentrasi pada fenomena sosial, memberikan suara kepada perasaan dan persepsi subjek penelitian.

Metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah proses ilmiah yang sah karena pengetahuan diciptakan dalam konteks sosial. "Keterlibatan Anggota DPRD Perempuan dalam Mengatasi Stunting di Surabaya" adalah tujuan dari penelitian kualitatif ini.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan, melalui deksripsi kata-kata dan bahasa. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mengumpulkan data menyeluruh tentang "Keterlibatan Anggota DPRD Perempuan dalam mengatasi Stunting Di Surabaya."

### 1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian<sup>83</sup>

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat: DPRD Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan Puskesmas Kota Surabaya. Di

antaranya adalah Puskesmas Dukuh Kupang, Medokan Ayu, Tambak Wedi, Kedungdoro, dan Lidah Kulon. Penulis memilih lokasi ini karena strategis untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian yang akan penulis pelajari. Studi ini dilakukan dari September 2023 hingga Juni 2024.

### 105 1.6.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menginvestigasi upaya konkrit yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan dan instansi pemerintah terkait di Surabaya dalam penanganan stunting. Penelitian akan mengeksplorasi strategi konkret yang diterapkan, peran serta anggota DPRD perempuan dalam pengambilan keputusan, implementasi program, serta koordinasi antarlembaga untuk mengatasi stunting di Surabaya. Selain itu, penelitian ini akan menggali sejauh mana keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam mengadvokasi kebijakan kesehatan masyarakat yang berfokus pada pencegahan stunting, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses ini.

### 136 1.6.4 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti berfungsi sebagai alat dan pengumpul data<sup>28</sup>. Karena peneliti tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga mengumpulkan data, kehadiran mereka sangat penting. seperti

34  
<sup>28</sup> Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

yang ditunjukkan oleh fakta bahwa pengumpulan data adalah salah satu karakteristik penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti hadir dalam penelitian ini sebagai pengamat dan berpartisipasi, sehingga mereka melihat dan mendengar dengan cermat selama proses pengumpulan data. Karena itu, peneliti di lapangan harus hadir atau terjun langsung dalam penelitian.

Untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan benar-benar valid, peneliti berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan informan. Pengumpul data utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Lexy, peran peneliti dalam penelitian kualitatif dalam hal ini cukup rumit. Selain itu, ia bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, analisis, dan penafsiran data, dan pada akhirnya, menjadi pendiri dari temuan penelitiannya.

Karena ia mencakup semua aspek dari proses penelitian secara keseluruhan, pengertian alat atau instrumen penelitian di sini tepat. Berdasarkan gagasan di atas, kehadiran peneliti, selain sebagai alat, sangat penting untuk seluruh proses penelitian. Karena kedalaman dan ketepatan analisis data bergantung pada peneliti. Peneliti akan hadir di lokasi penelitian pada waktu yang telah dijadwalkan setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian.

## 1.6.5 Teknik Pengambilan Populasi dan Informan

### 1.6.5.1 Key Informan

Para informan utama termasuk anggota DPRD perempuan dari Komisi D yaitu Herlina Harsono Njoto S.Psi, M.Psi, petugas dinas kesehatan yaitu Dicky Rianda, dan petugas puskesmas dari Dukuh Kupang yaitu Ratnaika Wahdini AMD Gizi, Arini AMD Gizi dari Puskesmas Lidah Kulon, Sri Anggrai Taningsih AMD Gizi dari Puskesmas Medokan Ayu, Dwi Putri Rachmawati AMD Gizi dari Puskesmas Tambak Wedi, serta Sholeh dari Puskesmas Kedungdoro. Mereka memberikan kontribusi penting dalam pengumpulan data dan penelitian ini.

Sampling dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti random sampling (pengambilan sampel acak), stratified sampling (pengambilan sampel berdasarkan lapisan atau strata tertentu), convenience sampling (pengambilan sampel berdasarkan kemudahan atau ketersediaan), dan sebagainya. Sangat penting untuk memilih metode sampling yang tepat untuk memastikan sampel yang diambil mewakili populasi yang tepat sehingga temuan penelitian dapat digunakan secara luas.

20

### 1.6.6 Sumber Data

Data Primer. Menurut Sugiyono<sup>29</sup> data primer adalah sumber data yang

78

<sup>29</sup> Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

<sup>147</sup> langsung memberikan kepada pengumpul data, berupa wawancara terhadap Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya.

<sup>39</sup> Data sekunder. Menurut Sugiyono<sup>30</sup> data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data, kepada pengumpul data berupa berita media tentang Keterlibatan Anggota DPRD Perempuan Dalam mengatasi Sunting di Surabaya.

## 1.6.7 Pengumpulan Data

### <sup>64</sup> 1.6.6.1 Data Primer

Data primer adalah informasi atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau langsung dari lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Pengumpulan data primer biasanya dilakukan melalui proses pengumpulan sistematis, yang dapat mencakup metode seperti survei, wawancara, eksperimen, observasi langsung, atau studi kasus. Keunggulan utama data primer adalah bahwa mereka dikumpulkan sesuai dengan kerangka waktu dan konteks penelitian yang diatur oleh peneliti, sehingga informasi yang dikumpulkan paling relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, peneliti memiliki kontrol yang lebih besar atas kualitas dan relevansi data yang dikumpulkan.

---

<sup>30</sup> *IBID*

### 1.6.6.2 Data Sekunder

<sup>39</sup> Informasi atau data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain atau dari sumber yang ada untuk tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian saat ini disebut data sekunder. Jenis data ini biasanya tersedia dan dapat diakses dalam bentuk publikasi akademis, laporan pemerintah, database organisasi, atau sumber lainnya. Penggunaan data sekunder sering kali memanfaatkan informasi yang sudah ada untuk mendukung atau menjawab pertanyaan penelitian yang sedang diteliti, yang membuatnya menjadi sumber yang efisien dalam hal waktu, biaya, dan upaya.

### 1.6.8 Observasi

<sup>7</sup> Metode observasi, juga dikenal sebagai pengamatan, adalah fokuskan seluruh panca indra pada suatu objek<sup>31</sup>. Namun, menurut Achmadi, pengamatan, atau observasi, adalah <sup>30</sup> metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer dan sekunder dengan mengamati dan mencatat gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan observasi langsung di institusi pemerintahan Surabaya tentang keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam mengatasi stunting.

### 1.6.9 Wawancara

<sup>74</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti sendiri menetapkan masalah dan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-

<sup>77</sup> <sup>31</sup> Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

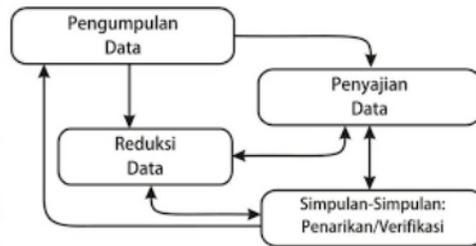
pertanyaan dalam jenis wawancara ini disusun dengan rapi dan ketat. <sup>7</sup>Peneliti berkonsentrasi pada mengumpulkan dan mendapatkan data dasar untuk penelitian ini melalui teknik wawancara.

#### <sup>32</sup>1.6.10 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain agar data dan temuannya mudah dipahami dan dikomunikasikan. <sup>52</sup>Data dikumpulkan dari lapangan peneliti dan disajikan dalam skripsi. Selanjutnya, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi disusun secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian, pendekatan es analisis digunakan, yang dimulai dengan fakta-fakta khusus dan kemudian menghasilkan generalisasi umum. Dalam situasi ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dari lapangan. Kemudian, data tersebut dipaparkan dan dianalisis menggunakan teknik induktif.

<sup>96</sup>Langkah yang diambil adalah pengumpulan data (hasil wawancara), reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tabel 3 Teknik Pengumpulan Data



114

Sumber : <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

#### 1. Pengumpulan Data

Wawancara mendalam digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan peneliti dan melacak berbagai aspek dan tujuan.<sup>32</sup>

#### 2. Reduksi Data

Proses perubahan data rekaman lapangan ke dalam pola, fokus, kategori atau berbagai pokok setelah data terkumpul.<sup>33</sup>

#### 3. Penyajian Data

Untuk membuat data terorganisir dan tersusun sehingga mudah dipahami, penyajian data dapat berupa bagan atau teks naratif.<sup>34</sup>

#### 4. Penarikan Kesimpulan

95

<sup>32</sup> Burhan, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grafindo Persada.

<sup>33</sup> IBID

<sup>34</sup> IBID

Proses yang berisi analisis dan mencari kesimpulan dari data yang ada<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> *IBID*

**53**  
**BAB II****GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Penelitian ini diambil lokasi yang berada di DPRD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kota Surabaya. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam mengatasi stunting di Surabaya. Adapun gambaran umum mengenai DPRD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kota Surabaya dapat dilihat dalam deskripsi berikut:

**3**  
**2.1 KEADAAN GEOGRAFIS KOTA SURABAYA**

Letak geografis kota Surabaya berada antara 112° 36" dan 112° 54" Bujur Timur serta antara 07° 12" garis Lintang Selatan. Luas wilayah kota Surabaya 326,37 km<sup>2</sup> terdiri dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan<sup>36</sup>.

Kota Surabaya terletak di daerah yang strategis sehingga Surabaya dapat dengan mudah dijangkau melalui jalur darat, udara dan laut. Surabaya dibatasi oleh wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Selat Madura

Sebelah Timur: Selat Madura

Sebelah Selatan: Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat: Kabupaten Gresik

<sup>2</sup> Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Sekilas Kota Surabaya. Diakses tanggal 15 Juni 2024, dari <https://www.surabaya.go.id/page/0/76094/sekilas-kota-surabaya>.

### 2.1.1 KEPENDUDUKAN

Data kependudukan sangat penting dan mempunyai arti yang strategis dalam pembangunan pada umumnya dan bidang kesehatan pada khususnya, sebab hampir semua kegiatan pembangunan kesehatan obyek sarannya adalah masyarakat atau penduduk.

Adapun jumlah penduduk kota Surabaya tahun 2016 adalah 2.862.406 jiwa meliputi jumlah penduduk laki-laki 1.414.025 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.448.381 jiwa dengan rasio jenis kelamin 97,63 dengan kepadatan penduduk 8.770 jiwa/km<sup>2</sup><sup>37</sup>.

Data kependudukan tidak lepas dengan data pendidikan. Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap dijadikan pertimbangan dalam mengukur tingkat pembangunan di suatu negara. Melalui pengetahuan, tingkat pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku hidup sehat.

### 2.2 Deskripsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya adalah lembaga legislative yang mewakili rakyat di tingkat kota dan memiliki fungsi

<sup>37</sup> Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (Tahun terbit atau akses). Profil Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Diakses tanggal 15 Juni 2024, dari <https://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/profil/profil-dinas-kesehatan-kota-surabaya/>

legislasi, penganggaran, dan pengawasan<sup>68</sup>. DPRD Kota Surabaya terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Lembaga ini berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Surabaya.

## 2.2.1 Visi dan Misi DPRD Kota Surabaya

Menjadikan DPRD Kota Surabaya sebagai lembaga perwakilan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 1. Meningkatkan Kualitas Legislasi:

Menghasilkan produk hukum yang berkualitas, adil, dan berpihak pada kepentingan Masyarakat.

### 2. Pengawasan yang Efektif:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah kota agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penyerapan Aspirasi Masyarakat:

Menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

### 4. Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme:

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD melalui pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi kebijakan.

<sup>68</sup> Dewan Perwakilan Rakyat. (Tahun terbit atau akses). Tugas dan Wewenang. Diakses tanggal 15 Juni 2024, dari <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.

### 2.2.2 Tugas dan Wewenang DPRD Kota Surabaya

#### 1. Fungsi Legislasi:

1. Membuat, mengubah, dan mencabut peraturan daerah (Perda) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Surabaya.
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan usulan dari pemerintah kota.

#### 2. Fungsi Penganggaran:

1. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan pemerintah kota.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

#### 3. Fungsi Pengawasan:

1. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota.
2. Memastikan bahwa pemerintah kota melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2.2.3 Struktur Organisasi DPRD Kota Surabaya

Struktur organisasi pemerintahan merupakan suatu susunan maupun hierarki unit atau bagian-bagian yang membentuk suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Struktur ini berfungsi untuk

memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah dilaksanakan secara efisien dan efektif<sup>39</sup>.

Struktur DPRD Kota Surabaya terdiri dari:

1. **Pimpinan DPRD**: Terdiri dari satu Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
2. **Komisi-Komisi**: DPRD dibagi menjadi beberapa komisi yang menangani bidang-bidang spesifik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Setiap komisi terdiri dari sejumlah anggota DPRD yang ditunjuk berdasarkan keahlian dan minat mereka.
3. **Badan-Badan**: Selain komisi, DPRD juga memiliki badan-badan seperti **Badan Anggaran**, **Badan Kehormatan**, dan **Badan Musyawarah** yang memiliki tugas khusus sesuai dengan kebutuhan legislatif.

#### 2.2.4 Komisi-Komisi DPRD Kota Surabaya

Setiap komisi dalam DPRD Surabaya memiliki tanggung jawab dan peran khusus yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan pembagian tugas yang jelas, DPRD Surabaya dapat lebih fokus dalam menangani berbagai isu dan kebutuhan masyarakat, serta

<sup>39</sup> DPRD Surabaya. (2024). Pimpinan DPRD Surabaya. Diakses tanggal 15 Juni 2024, dari <https://dprd.surabaya.go.id/pimpinan>.

memastikan bahwa program-program pemerintah kota dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga Surabaya<sup>40</sup>.

Komisi-komisi DPRD Kota Surabaya terdiri dari:

1. Komisi A (Bidang Pemerintahan): Bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum, hukum, dan aparatur negara.
2. Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan): Mengurus bidang perekonomian, keuangan daerah, perdagangan, industri, dan usaha kecil menengah (UKM).
3. Komisi C (Bidang Pembangunan): Fokus pada urusan pembangunan infrastruktur, perumahan, tata ruang, dan lingkungan hidup.
4. Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat): Menangani bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

#### 2.2.5 Peran dan Tanggung Jawab Komisi D DPRD Surabaya

Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) memiliki tanggung jawab yang luas dan penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Komisi D menangani bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Komisi ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan

<sup>40</sup> detikNews. (2019). Ini Struktur Empat Komisi DPRD Surabaya Periode 2019-2024. Diakses tanggal 15 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4729504/ini-struktur-empat-komisi-dprd-surabaya-periode-2019-2024>.

rakyat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan. Berikut adalah rincian tugas dan fungsi Komisi D:

**Bidang Pendidikan:**

1. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program pendidikan di Surabaya, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
2. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan anggaran, sarana dan prasarana pendidikan, serta kesejahteraan tenaga pendidik.

**Bidang Kesehatan:**

1. Mengawasi pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya.
2. Mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penanggulangan penyakit menular.

**Bidang Sosial:**

1. Menangani masalah sosial seperti kemiskinan, anak terlantar, dan tunawisma.
2. Mengembangkan program-program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat marginal.

**Bidang Tenaga Kerja:**

1. Mengawasi kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, dan hubungan industrial.
2. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan perlindungan hak-hak pekerja.

**Kesejahteraan Umum:**

1. Mengawasi program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan umum masyarakat, termasuk distribusi bantuan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan.

Komisi D juga berperan aktif dalam menyusun dan mengevaluasi anggaran yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

### 2.3 Deskripsi **Dinas Kesehatan Surabaya**

Dinas kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan<sup>41</sup>.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana peraturan diatas,

Dinas Kesehatan Kota Surabaya mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

<sup>41</sup> Pemerintah Kota Surabaya. (2021). Dinas Kesehatan. Diakses tanggal 15 Juni 2024, dari <https://surabaya.go.id/id/page/0/8077/dinas-kesehatan>.

- 2 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

### 2.3.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Surabaya

2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Surabaya berdasarkan pada Visi kota Surabaya tahun 2016-2017 yaitu **“Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing global Berbasis Ekologi”**, serta Misi ke-1 yaitu **“Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas”**. Berikut ini adalah rumusan Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yaitu:

1. Visi Dinas Kesehatan Kota Surabaya  
Dinas Kesehatan yang professional untuk mewujudkan masyarakat Surabaya sehat, mandiri dan berdaya saing global.
2. Misi Dinas Kesehatan Kota Surabaya
  - 40 a. Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan
  - b. Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan
  - c. Meningkatkan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan<sup>42</sup>.

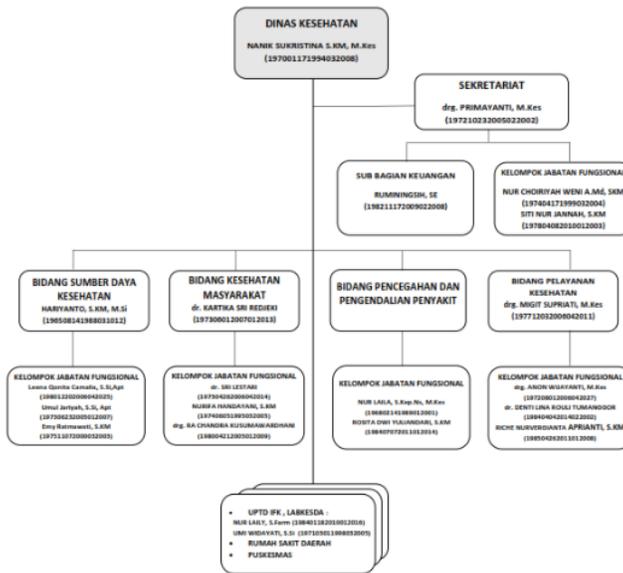
<sup>42</sup> Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2024). Visi Misi. Diakses tanggal 15 Juni 2024, dari <https://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/profil/visi-misi/>.

### 2.3.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dibantu oleh satu Sekretariat dan empat Bidang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, dan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Untuk melihat struktur kepengurusan organisasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat dilihat melalui bagan dibawah ini:

72  
 Bagan 1.2 Struktur Organisasi kepengurusan Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Gambar 2 Struktur Dinas Kesehatan Surabaya



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Tahun 2024

148  
 2.4 Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan

Stunting di Kota Surabaya.

Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya merupakan landasan hukum yang

penting dalam upaya mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut<sup>43</sup>. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi stunting di Kota Surabaya melalui berbagai strategi dan program yang telah ditetapkan secara resmi.

Sebagaimana tercantum maksud dan tujuan Perwali ini ada dalam Bab 143 2 pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022. Dalam isi peraturan ini, termasuk di dalamnya adalah definisi yang jelas mengenai stunting, penetapan target penurunan angka stunting, serta langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum.

Selain itu, peraturan ini juga menetapkan pembentukan badan atau komite khusus yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan program-program yang telah disusun untuk mencapai tujuan penurunan stunting. Dengan adanya Peraturan Walikota ini, diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama dan mengimplementasikan kebijakan publik serta program kesehatan masyarakat yang efektif guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk Kota Surabaya secara keseluruhan.

2 Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya adalah sebuah langkah penting dalam upaya mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut. Dokumen hukum ini secara jelas menetapkan tujuan utama untuk mengurangi prevalensi stunting melalui strategi dan program yang terintegrasi secara menyeluruh. Pasal 3 dari

Bab II Peraturan Walikota ini menguraikan beberapa tujuan kunci, termasuk meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, integrasi program yang terkait, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku guna mencegah stunting.

Dalam isi peraturan ini, terdapat definisi yang jelas mengenai stunting, penetapan target penurunan angka stunting, dan langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Pembentukan badan atau komite khusus yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan program juga ditetapkan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya penurunan stunting.

Peraturan Walikota ini menjadi instrumen hukum yang mengikat bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menerapkan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk Kota Surabaya secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan bahwa implementasi yang tepat dan komprehensif dari peraturan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

### BAB III

#### TEMUAN DAN ANALISA DATA

<sup>82</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berperan penting dalam upaya mengatasi masalah stunting di Surabaya. Pertama, peneliti berinteraksi dengan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai <sup>45</sup> kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi stunting, serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut.

<sup>29</sup> Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota DPRD Surabaya. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan perspektif legislatif terkait isu stunting, termasuk peran anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan kesehatan dan dukungan terhadap program pencegahan stunting di tingkat lokal.

Terakhir, peneliti melakukan wawancara dengan petugas dari beberapa puskesmas di Surabaya. Wawancara ini dimaksudkan untuk memahami peran serta puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil dan balita, serta upaya konkret yang dilakukan dalam mengurangi prevalensi stunting melalui monitoring gizi, perawatan prenatal, dan penyuluhan kepada masyarakat.

Melalui berbagai wawancara ini, peneliti dapat mengumpulkan data dan perspektif yang komprehensif dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam upaya menanggulangi stunting di Kota Surabaya, baik dari segi kebijakan, legislatif, maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Konsep "input-output system" yang dikembangkan oleh David Easton dapat diterapkan dalam konteks penanganan masalah stunting di kota Surabaya. Dalam konteks ini, legislator atau anggota DPRD memiliki peran krusial dalam menghubungkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terkait stunting dengan proses pembuatan kebijakan yang responsif.

### 29 3.1 Wawancara dengan Anggota DPRD Kota Surabaya

29  
Untuk menjawab permasalahan stunting yang kompleks, peneliti melakukan wawancara langsung dengan anggota DPRD Kota Surabaya. Dalam wawancara ini, anggota DPRD memberikan perspektif dan informasi mengenai upaya serta program yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi stunting di Kota Surabaya. Diskusi meliputi pandangan tentang kondisi stunting di wilayah tersebut, peran anggota DPRD dalam advokasi kebijakan kesehatan, serta evaluasi terhadap efektivitas program yang telah diterapkan. Hasil wawancara ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang strategi dan tantangan dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di Kota Surabaya dari sudut pandang legislatif.

“Sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, saya memiliki pandangan yang serius terhadap masalah stunting di wilayah ini. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan intelektual mereka. Kami terus mendiskusikan dan mengangkat isu ini dalam berbagai forum untuk mencari solusi yang lebih efektif. Isu stunting sering dibahas dalam sidang DPRD, terutama ketika mengadakan pembahasan anggaran kesehatan dan program perlindungan sosial. Anggota DPRD perempuan aktif bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait untuk mengatasi stunting melalui advokasi kebijakan, pengawasan implementasi program, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi dan perawatan prenatal. Saya menyambut baik Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya, yang diharapkan

dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi dan masyarakat dalam upaya mengurangi prevalensi stunting. Tingkat kesehatan masyarakat Kota Surabaya menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa aspek, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Sebagai anggota DPRD, peran saya dalam menanggulangi stunting meliputi advokasi kebijakan, pengawasan program, dan partisipasi aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan program penanggulangan stunting (29 Herlina Harsono Njoto S.Psi, M.Psi pada 19 Mei 2024 bertempat di DPRD Kota Surabaya).

Dalam wawancara dengan anggota DPRD Kota Surabaya mengenai penanganan stunting, terungkap bahwa anggota DPRD memberikan perhatian serius terhadap masalah ini karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan perkembangan anak-anak. Meskipun belum ada program khusus yang diinisiasi oleh anggota DPRD perempuan, isu stunting secara aktif dibahas dalam sidang DPRD, khususnya dalam konteks anggaran kesehatan dan perlindungan sosial. Anggota DPRD perempuan juga berperan penting dalam bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk mengatasi stunting melalui advokasi kebijakan, pengawasan program, dan sosialisasi gizi serta perawatan prenatal kepada masyarakat.

Sikap positif disampaikan terhadap Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 yang bertujuan mempercepat penurunan stunting di Kota Surabaya, dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dan melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam upaya pencegahan. Meskipun terdapat perkembangan positif dalam kesehatan masyarakat Kota Surabaya, tetap ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sebagai anggota DPRD, peran mereka mencakup advokasi kebijakan, pengawasan implementasi program, serta partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program

penanggulangan stunting. Dengan demikian, hasil wawancara ini memberikan gambaran komprehensif tentang strategi dan tantangan dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di Kota Surabaya dari perspektif legislatif.

### 3.2 Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Peneliti telah melakukan wawancara dengan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam wawancara tersebut, petugas tersebut memberikan gambaran yang mendalam mengenai berbagai aspek terkait kesehatan masyarakat di Kota Surabaya, termasuk implementasi Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Petugas ini menekankan pentingnya koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun kebijakan dan program kesehatan yang efektif, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Hasil wawancara ini juga menggambarkan upaya preventif yang dilakukan untuk mengatasi masalah stunting, termasuk integrasi program-program terpadu dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan perawatan prenatal.

“Sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, saya telah bertugas di sini sejak tahun 2015. Kami menjalin komunikasi yang erat dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun kebijakan dan program-program kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami sangat mendukung Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya karena peraturan ini mengintegrasikan berbagai program untuk mengurangi prevalensi stunting melalui sinergi dan koordinasi yang baik. Tingkat kesehatan masyarakat umum di Kota Surabaya relatif baik, namun kami terus berupaya memperbaiki layanan kesehatan agar lebih merata. Tingkat kelahiran stabil dan ibu hamil mendapatkan perawatan prenatal yang terjamin. Program-program kami juga berfokus pada kesehatan ibu dan anak dengan hasil yang positif, meskipun tantangan masih ada. Kami

secara rutin berkomunikasi dengan Anggota Dewan untuk memastikan implementasi Perwali No 79 dijalankan dengan efektif. Langkah preventif kami meliputi penyuluhan gizi dan peningkatan akses layanan kesehatan. Terkait pengelolaan stunting, kami melanjutkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya, baik di bawah kepemimpinan Bu Risma maupun Pak Eri Cahyadi, dengan fokus pada perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih sehat. Implementasi Perwali telah menjangkau puskesmas dan terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam menanggulangi masalah stunting di Kota Surabaya.” (Dicky Rianda, pada 4 Juni 2024 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Surabaya).

Hasil wawancara dengan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengungkapkan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai aspek kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, terutama terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Petugas tersebut menekankan pentingnya kolaborasi yang erat dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun kebijakan dan program kesehatan yang efektif, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks penanganan stunting, wawancara menggambarkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Surabaya aktif menerapkan langkah-langkah preventif, termasuk integrasi program-program terpadu dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan perawatan prenatal. Meskipun tingkat kesehatan masyarakat umum di Kota Surabaya tergolong baik, Dinas Kesehatan terus berupaya untuk memastikan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga.

Tingkat kelahiran yang stabil dan perawatan prenatal yang terjamin bagi ibu hamil juga menjadi fokus dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Program

khusus untuk kesehatan ibu dan anak telah memberikan hasil positif, meskipun tantangan dalam peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku tetap ada.

Dalam hal implementasi Perwali No 79, Dinas Kesehatan aktif berkoordinasi dengan Anggota Dewan untuk memastikan kebijakan ini dijalankan secara efektif di lapangan. Langkah-langkah ini melibatkan penyuluhan gizi, penguatan akses layanan kesehatan, dan upaya pencegahan stunting yang lebih terfokus.

Pengelolaan stunting di Kota Surabaya telah melanjutkan keberlanjutan dari program-program sebelumnya di bawah kepemimpinan sebelumnya, dengan fokus pada pendekatan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Implementasi Perwali telah diterapkan di tingkat puskesmas untuk memastikan dampak yang maksimal dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Surabaya.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan komitmen yang kuat dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, khususnya terkait dengan stunting, serta upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui kebijakan dan program yang berbasis pada bukti dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

### **3.3 Wawancara dengan Puskesmas Kota Surabaya**

Untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih lengkap dari perspektif petugas puskesmas, peneliti melakukan wawancara langsung dengan mereka di Kota Surabaya. Dalam wawancara tersebut, petugas

puskesmas memberikan insight tentang kondisi kesehatan masyarakat terkait stunting, upaya yang dilakukan dalam memberikan layanan kepada ibu hamil dan balita, serta peran mereka dalam mendukung program-program pencegahan stunting yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan DPRD. Diskusi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas program yang telah diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di Kota Surabaya. Hasil wawancara ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran puskesmas dalam sistem kesehatan masyarakat dan upaya konkret dalam menanggulangi stunting di tingkat lokal.

Diantaranya lokasi puskesmas yang di wawancara adalah Puskesmas Dukuh Kupang, Puskesmas Lidah Kulon, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Tambak Wedi, Puskesmas Kedungdoro

“Sebagai petugas puskesmas di Dukuh Kupang Surabaya, saya memiliki pandangan yang mendalam terhadap masalah stunting di wilayah ini. Stunting merupakan masalah serius karena dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara jangka panjang. Kami di puskesmas aktif berperan dalam memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil dan balita, termasuk monitoring gizi dan perawatan prenatal yang berkualitas. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kebijakan dan perencanaan di DPRD, kami menyambut baik upaya mereka dalam mendukung penurunan stunting melalui advokasi kebijakan dan pengawasan program kesehatan.

Diskusi tentang stunting sering terjadi di antara staf puskesmas, terutama ketika merencanakan program kesehatan masyarakat yang menyangkut balita dan ibu hamil. Kami berkomunikasi secara rutin dengan anggota DPRD dan instansi pemerintah terkait untuk memastikan implementasi program penanggulangan stunting berjalan efektif. Kami melihat bahwa Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya sebagai langkah positif yang dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memperkuat upaya pencegahan stunting di tingkat lokal.

Tingkat kesehatan masyarakat Kota Surabaya menunjukkan peningkatan, tetapi kami tetap menghadapi tantangan seperti akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

gizi yang baik. Bar<sup>104</sup> ibu-ibu sangat bersyukur karena mereka telah dapat mengatasi stunting pada anak-anak mereka sejak usia dini dan memberikan pengetahuan penting mengenai gizi untuk perkembangan anak-anak mereka. Kami terus berupaya untuk meningkatkan pendekatan preventif melalui penyuluhan kepada ibu hamil dan pengasuhan anak yang sehat. Dengan demikian, peran kami sebagai petugas puskesmas adalah memberikan layanan yang terbaik dan mendukung upaya bersama untuk mengatasi stunting di Kota Surabaya.” (Ratnaika Wahdini AMD Gizi pada 10 Juni 2024 bertempat di Puskesmas Dukuh Kupang).

Puskesmas Dukuh Kupang di Surabaya<sup>112</sup> terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayahnya. Sebagai bagian dari jaringan pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas ini memiliki peran penting<sup>24</sup> dalam memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil dan balita dengan fokus pada monitoring gizi dan perawatan prenatal yang berkualitas. Selain itu, staf Puskesmas Dukuh Kupang secara rutin melakukan diskusi dan perencanaan program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting.

Puskesmas ini tidak hanya menjadi tempat pelayanan medis tetapi juga pusat penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik selama masa kehamilan dan masa pertumbuhan awal anak. Kolaborasi yang erat dengan anggota DPRD dan instansi terkait<sup>11</sup> memastikan bahwa program-program pencegahan stunting dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Kota Surabaya.

Dengan komitmen ini, Puskesmas Dukuh Kupang tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga garda terdepan dalam memerangi stunting,<sup>28</sup> memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang

sama terhadap nutrisi yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangannya.

Puskesmas Kedungdoro juga aktif berperan sebagai tempat pelayanan kesehatan penting di Surabaya. Seperti Puskesmas Dukuh Kupang, Puskesmas Wiyung turut terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayahnya. Puskesmas ini menyediakan layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, dengan fokus pada monitoring gizi dan perawatan prenatal yang berkualitas.

“Kami aktif memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil dan balita dengan fokus pada monitoring gizi dan perawatan prenatal yang berkualitas. Setiap kunjungan ke Puskesmas melibatkan pengukuran tinggi badan dan berat badan balita untuk mengidentifikasi kasus stunting. Program kami meliputi penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan orang tua balita, pemberian suplemen gizi, serta advokasi pola makan sehat dan pola asuh yang baik. Banyak dari mereka bersyukur karena telah memperoleh pengetahuan yang penting untuk kesehatan diri dan anak-anak mereka. Kami juga mengimplementasikan Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2022 untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan stunting. Sosialisasi mengenai Peraturan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan kelompok orang tua, posyandu, dan kampanye kesehatan. Kami secara rutin menyelenggarakan program edukasi dan penyuluhan tentang stunting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik untuk pertumbuhan anak-anak. Tantangan yang kami hadapi termasuk kesadaran masyarakat yang belum optimal, akses terhadap layanan kesehatan yang merata, serta koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait. Ketika kasus stunting teridentifikasi, kami memberikan pendampingan khusus kepada keluarga dengan anak stunting, termasuk konseling gizi dan bantuan dalam merencanakan pola makan sehat. Evaluasi terhadap program kami dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil. Kami juga menjalin kerja sama dengan DPRD, dalam advokasi kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan upaya penanganan stunting. Rekomendasi kami termasuk perluasan sosialisasi gizi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program kami berjalan efektif dalam mengatasi stunting di Surabaya.” (Sholeh pada 12 Juni 2024 bertempat di Puskesmas Kedungdoro).

Hasil wawancara dengan petugas Puskesmas Kedungdoro mengungkapkan komitmen mereka yang kuat dalam mengatasi masalah stunting di Surabaya. Mereka menjelaskan bahwa puskesmas ini tidak hanya menyediakan layanan kesehatan rutin kepada ibu hamil dan balita, tetapi juga aktif dalam monitoring gizi dan perawatan prenatal yang berkualitas. Pengukuran rutin terhadap tinggi badan dan berat badan balita dilakukan untuk mendeteksi kasus stunting sejak dini, yang menjadi fokus utama dalam pelayanan mereka.

Program-program yang dijalankan oleh Puskesmas Kedungdoro meliputi penyuluhan gizi yang intensif kepada ibu hamil dan orang tua balita, serta pemberian suplemen gizi untuk memastikan kebutuhan nutrisi tercukupi. Mereka juga melakukan advokasi aktif untuk mempromosikan pola makan sehat dan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga. Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2022 menjadi landasan hukum yang penting bagi mereka dalam meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penanggulangan stunting.

Dalam hal sosialisasi, Puskesmas Kedungdoro menggunakan berbagai pendekatan komunitas seperti pertemuan kelompok orang tua, posyandu, dan kampanye kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai Peraturan tersebut dan pentingnya gizi yang baik dalam pertumbuhan anak-anak. Meskipun mereka menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dan akses merata terhadap layanan kesehatan, mereka

tetap berupaya keras untuk menjangkau lebih banyak orang dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Ketika kasus stunting teridentifikasi, Puskesmas Kedungdoro memberikan pendampingan khusus kepada keluarga yang terkena dampak, termasuk konseling gizi dan bantuan dalam merencanakan pola makan yang sesuai untuk anak-anak mereka. Evaluasi program secara berkala dilakukan untuk menilai keberhasilan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil, sambil terus bekerja sama dengan anggota DPRD, termasuk perempuan, dalam mendukung kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Secara keseluruhan, Puskesmas Kedungdoro memberikan gambaran tentang upaya komprehensif mereka dalam menghadapi tantangan stunting di Surabaya. Dari pelayanan langsung hingga advokasi kebijakan dan kerja sama lintas sektor, mereka berperan penting dalam memastikan bahwa **101** setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh kembang secara sehat dan optimal.

Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2022 menjadi landasan penting dalam kerja kami untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan stunting. Kami menyosialisasikan peraturan ini melalui berbagai kegiatan komunitas seperti pertemuan kelompok orang tua, posyandu, dan kampanye kesehatan. Selain itu, kami rutin mengadakan program edukasi dan penyuluhan tentang stunting untuk **21** meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak-anak.

Puskesmas Medokan Ayu di Surabaya memiliki peran yang signifikan dalam upaya penanganan stunting di wilayahnya. Puskesmas ini secara aktif terlibat dalam menyediakan layanan kesehatan yang mendukung pertumbuhan optimal balita dan pencegahan stunting. Mereka melakukan monitoring gizi secara rutin terhadap balita yang datang untuk pelayanan kesehatan, dengan mengukur tinggi badan dan berat badan untuk mengidentifikasi dini kasus stunting.

“Kami menghadapi beberapa tantangan dalam upaya kami, seperti tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta akses merata terhadap layanan kesehatan di berbagai wilayah. Dalam penanganan kasus stunting yang teridentifikasi, kami memberikan pendampingan khusus kepada keluarga dengan anak stunting melalui konseling gizi dan bantuan dalam perencanaan pola makan sehat yang sesuai. Evaluasi program secara berkala kami lakukan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah kami ambil serta mengidentifikasi area perbaikan yang dibutuhkan. Kami mendukung kebijakan kesehatan masyarakat untuk memperkuat upaya penanganan stunting, masyarakat pun merasa sangat terbantu dengan adanya program ini.. Rekomendasi kami termasuk meningkatkan sosialisasi gizi, memperluas akses layanan kesehatan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan program kami dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam menanggulangi stunting di Surabaya.” (Sri Anggrai Taningsih AMD Gizi pada 13 Juni 2024 bertempat di Puskesmas Medokan Ayu.

Hasil wawancara dengan petugas Puskesmas Medokan Ayu menggambarkan komitmen mereka dalam mengatasi stunting di Surabaya dengan berbagai langkah konkret. Mereka menjelaskan bahwa Puskesmas ini memainkan peran sentral dalam menyediakan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan stunting melalui monitoring gizi yang rutin. Setiap kunjungan balita ke Puskesmas ini

melibatkan pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk mengidentifikasi dini kasus stunting, sehingga intervensi dapat dilakukan sejak dini.

Program yang dijalankan Puskesmas Medokan Ayu mencakup berbagai kegiatan edukasi, seperti <sup>62</sup> penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan orang tua balita, serta pemberian suplemen gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Mereka juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pola makan sehat dan pola asuh yang baik melalui berbagai forum komunitas seperti posyandu dan pertemuan kelompok orang tua.

Implementasi kebijakan seperti Peraturan Walikota Surabaya yang mendukung upaya penurunan stunting menjadi bagian penting dari strategi Puskesmas Medokan Ayu. Mereka melakukan sosialisasi peraturan ini secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai cara komunikasi, termasuk kampanye kesehatan dan media sosial.

Meskipun menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan dan akses terhadap layanan kesehatan yang merata, Puskesmas Medokan Ayu tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan efektif dalam mengatasi stunting. Evaluasi program secara berkala dilakukan <sup>31</sup> untuk menilai keberhasilan langkah-langkah yang diambil dan menyesuaikan strategi agar lebih efektif.

Secara keseluruhan, Puskesmas Medokan Ayu tidak hanya menjadi penyedia layanan kesehatan, tetapi juga agen perubahan dalam masyarakat Surabaya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dedikasi mereka terhadap kesehatan <sup>11</sup> anak-anak dan ibu hamil melalui pendekatan holistik ini

memperlihatkan komitmen yang kuat dalam membangun generasi masa depan yang sehat dan tangguh.

Petugas Puskesmas Tambak Wedi di Surabaya memiliki peran strategis dalam penanganan stunting dengan fokus pada upaya preventif dan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu dan balita. Identifikasi kasus stunting melalui monitoring rutin <sup>142</sup> tinggi badan dan berat badan balita yang datang ke posyandu.

“Program yang kami jalankan di Puskesmas Tambak Wedi sangat menekankan pada edukasi gizi bagi ibu hamil dan orang tua balita. Kami memberikan penyuluhan tentang makanan bergizi yang dianjurkan sebagai tambahan gizi untuk balita, seperti makanan tinggi protein, sayuran hijau, dan buah-buahan. Selain itu, kami <sup>21</sup> aktif mengadakan kampanye dan seminar kesehatan di posyandu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang anak. Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2022 di Puskesmas kami dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mendukung upaya penanggulangan stunting. Kami menyosialisasikan peraturan ini melalui kegiatan posyandu dan pertemuan komunitas, serta memanfaatkan media sosial untuk mencapai lebih banyak orang. Tantangan yang kami hadapi termasuk tingkat kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak, serta akses terhadap layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah kerja Puskesmas. Namun, kami terus berupaya mengatasi ini dengan pendekatan edukasi yang intensif dan mendalam. Ketika kasus stunting teridentifikasi, kami memberikan pendampingan khusus kepada keluarga dengan anak stunting. Ini termasuk konseling gizi mendalam dan bantuan dalam perencanaan pola makan sehari-hari yang sehat dan bergizi. <sup>31</sup> Luasi program kami dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi aktivitas langkah-langkah yang telah diambil dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. Kami melibatkan tenaga kesehatan dengan intens dalam semua aspek program penanganan stunting, mulai dari pelayanan langsung hingga penyuluhan kepada masyarakat.” (Dwi Putri Rachmawati pada 18 Juni 2024 bertempat di Puskesmas Tambak Wedi).

Hasil wawancara dengan petugas Puskesmas Tambak Wedi menggambarkan komitmen mereka dalam mengatasi stunting dengan pendekatan yang kuat pada edukasi gizi dan kolaborasi lintas sektor. Mereka

menjelaskan bahwa di Puskesmas ini, program utama difokuskan pada penyuluhan gizi bagi ibu hamil dan orang tua balita, dengan memberikan informasi tentang makanan bergizi seperti protein tinggi, sayuran hijau, dan buah-buahan yang penting untuk pertumbuhan anak.

Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2022 menjadi landasan penting dalam upaya mereka, dengan memperkuat kolaborasi antarinstansi dan menyosialisasikan peraturan melalui posyandu dan pertemuan komunitas. Mereka juga menggunakan media sosial sebagai alat untuk mencapai lebih banyak orang dalam menyampaikan pesan tentang gizi yang seimbang untuk anak-anak.

Tantangan yang dihadapi termasuk tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan mengenai pentingnya gizi seimbang dan akses merata terhadap layanan kesehatan. Namun demikian, mereka terus berupaya dengan pendekatan edukasi yang intensif dan mendalam, serta memberikan pendampingan khusus kepada keluarga dengan anak stunting, termasuk konseling gizi dan bantuan dalam merencanakan pola makan yang sehat.

Evaluasi program secara berkala dilakukan untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Tenaga kesehatan di Puskesmas ini terlibat aktif dalam semua aspek program penanganan stunting, dari layanan langsung hingga penyuluhan kepada masyarakat.

Posyandu juga ditekankan sebagai elemen kunci dalam mendukung program mereka, sebagai tempat untuk rutin mengukur pertumbuhan balita dan

memberikan edukasi gizi kepada ibu-ibu. Secara keseluruhan, Puskesmas Pucang Sewu menunjukkan komitmen yang kokoh dalam upaya mereka untuk mengurangi angka stunting di komunitas mereka, dengan fokus pada edukasi gizi yang intensif dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Posyandu memainkan peran penting dalam mendukung program penanganan stunting di Puskesmas kami. Sebagai tempat rutin pengukuran pertumbuhan balita dan penyuluhan gizi kepada ibu-ibu, posyandu menjadi jembatan utama dalam mendapatkan informasi dan layanan kesehatan bagi keluarga.

Puskesmas Lidah Kulon di Surabaya juga memiliki peran yang signifikan dalam penanganan stunting di lingkungannya. Seperti Puskesmas lainnya, mereka secara aktif terlibat dalam memberikan layanan kesehatan yang mendukung pertumbuhan optimal balita dan pencegahan stunting. Puskesmas ini melakukan identifikasi kasus stunting melalui pengukuran rutin tinggi badan dan berat badan balita yang datang untuk pelayanan kesehatan, khususnya di posyandu dan tempat-tempat lain yang menjadi pusat perhatian masyarakat.

“Sebagai Puskesmas yang terletak di lingkungan padat penduduk di Surabaya, peran kami sangat vital dalam penanganan stunting. Kami memastikan bahwa setiap kunjungan balita ke posyandu besar di Puskesmas ini tidak hanya untuk pelayanan kesehatan umum, tetapi juga untuk monitoring gizi secara rutin. Pengukuran tinggi badan dan berat badan dilakukan secara teratur untuk mengidentifikasi dini kasus stunting. Tantangan utama yang kami hadapi termasuk tingkat kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan terkait gizi seimbang untuk anak-anak, serta akses terhadap layanan kesehatan yang merata di lingkungan padat penduduk. Kami berusaha mengatasi tantangan ini dengan mengintensifkan program edukasi gizi dan meningkatkan keterlibatan aktif tenaga kesehatan di posyandu besar.

Ketika kasus stunting teridentifikasi, kami memberikan pendampingan khusus kepada keluarga dengan anak stunting, seperti konseling gizi mendalam dan bantuan dalam perencanaan pola makan yang sehat dan bergizi. Evaluasi program kami dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil dan mengidentifikasi area perbaikan. Posyandu besar memainkan peran sentral dalam mendukung program penanganan stunting di Puskesmas kami. Sebagai tempat rutin pengukuran pertumbuhan balita dan edukasi gizi kepada ibu-ibu, posyandu besar menjadi platform strategis dalam memberikan informasi dan layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan padat penduduk.” (Wawancara dengan Arini AMD Gizi pada 20 Juni 2024 bertempat di Puskesmas Lidah Kulon).

Puskesmas yang terletak di lingkungan padat penduduk di Surabaya ini menggambarkan komitmen mereka dalam penanganan stunting melalui pendekatan yang intensif dan terarah. Mereka menekankan bahwa setiap kunjungan balita ke posyandu di Puskesmas ini tidak hanya untuk pelayanan kesehatan umum, tetapi juga untuk monitoring gizi secara rutin <sup>15</sup> dengan mengukur tinggi badan dan berat badan untuk mengidentifikasi dini kasus stunting.

Tantangan utama yang dihadapi Puskesmas ini termasuk tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terkait gizi seimbang untuk anak-anak, serta akses terhadap layanan kesehatan yang merata di lingkungan padat penduduk. Namun demikian, mereka menekankan bahwa mereka mengatasi tantangan ini dengan mengintensifkan program edukasi gizi yang melibatkan aktif tenaga kesehatan di posyandu besar.

Ketika kasus stunting teridentifikasi, Puskesmas memberikan pendampingan khusus kepada keluarga dengan anak stunting, seperti konseling gizi mendalam dan bantuan dalam merencanakan pola makan yang sehat dan bergizi. Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi

efektivitas langkah-langkah yang diambil dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan.

Posyandu besar di Puskesmas ini memainkan peran penting dalam mendukung program penanganan stunting. Mereka menjadi tempat rutin untuk mengukur pertumbuhan balita dan memberikan edukasi gizi kepada ibu-ibu, yang merupakan strategi utama dalam memberikan informasi dan layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan padat penduduk. Dengan demikian, Puskesmas ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi angka stunting melalui pendekatan holistik dan terintegrasi di komunitas yang mereka layani.

#### 3.4 Hasil Analisa

Hasil wawancara dengan petugas puskesmas di Surabaya menggambarkan pemahaman mendalam tentang masalah stunting di wilayah tersebut. Mereka menyadari bahwa <sup>126</sup> stunting bukan hanya masalah kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan mereka dalam jangka panjang. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, petugas puskesmas secara aktif terlibat <sup>24</sup> dalam memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil dan balita, dengan fokus pada monitoring gizi dan perawatan prenatal yang berkualitas.

Gambar 3 Peta Analisa



Sumber : Hasil olahan analisa peneliti

Meskipun tidak langsung terlibat dalam kebijakan dan perencanaan di DPRD, petugas puskesmas mengapresiasi peran DPRD dalam mendukung upaya penurunan stunting melalui advokasi kebijakan dan pengawasan program kesehatan. Mereka menyatakan bahwa diskusi tentang stunting sering terjadi di antara staf puskesmas, terutama saat merencanakan program kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk balita dan ibu hamil. Komunikasi yang rutin dengan anggota DPRD dan instansi pemerintah lainnya dianggap penting untuk memastikan implementasi program penanggulangan stunting berjalan efektif.

Petugas puskesmas melihat Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 sebagai langkah positif dalam meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memperkuat upaya pencegahan stunting di tingkat lokal. Meskipun ada peningkatan dalam tingkat kesehatan masyarakat Kota Surabaya, mereka tetap

menghadapi tantangan seperti akses merata terhadap layanan kesehatan dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik. Untuk mengatasi hal ini, mereka terus berupaya meningkatkan pendekatan preventif melalui penyuluhan kepada ibu hamil dan kampanye untuk pengasuhan anak yang sehat.

Dalam upaya mengatasi masalah stunting di Kota Surabaya, berbagai pihak terlibat aktif dengan peran yang berbeda namun saling terkait. Dinas Kesehatan Kota Surabaya memainkan peran sentral dalam merancang dan mengelola kebijakan serta program kesehatan yang bertujuan menurunkan prevalensi stunting. Melalui wawancara dengan petugas dari Dinkes, terungkap bahwa mereka fokus pada integrasi program-program terpadu dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan perawatan prenatal. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan efektivitas implementasi program di tingkat puskesmas untuk meraih hasil yang maksimal.

Di sisi legislatif, anggota DPRD Kota Surabaya juga memiliki peran penting dalam advokasi kebijakan kesehatan dan pengawasan program pencegahan stunting. Dalam wawancara dengan anggota DPRD, terlihat bahwa mereka aktif membahas isu stunting dalam sidang DPRD dan berkolaborasi dengan instansi pemerintah untuk menyusun anggaran kesehatan yang mendukung program-program kesehatan masyarakat. Tantangan mereka meliputi koordinasi yang efektif antarlembaga legislatif dan eksekutif serta memastikan dukungan berkelanjutan terhadap inisiatif kesehatan.

Selain itu, peran petugas puskesmas tidak dapat dipandang remeh dalam penanggulangan stunting. Mereka berada di garis depan <sup>24</sup> dalam memberikan layanan kesehatan langsung kepada ibu hamil dan balita, dengan fokus pada monitoring gizi, perawatan prenatal, dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam wawancara dengan petugas puskesmas, terungkap bahwa mereka berkomunikasi rutin dengan anggota DPRD dan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan implementasi program pencegahan stunting berjalan efektif di level lokal. Tantangan yang dihadapi termasuk akses terhadap sumber daya yang memadai untuk mendukung program kesehatan yang mereka jalankan di masyarakat setempat.

Kolaborasi yang erat antara Dinkes, anggota DPRD, dan petugas puskesmas menjadi kunci dalam upaya bersama untuk mengurangi prevalensi stunting di Kota Surabaya. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan sinergi antarberbagai pihak, <sup>55</sup> diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak buruk stunting bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran serta aktif petugas puskesmas dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di Kota Surabaya. Mereka berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dan berperan penting dalam mendukung upaya <sup>139</sup> bersama untuk mencapai kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Konsep "input-output system" yang dikembangkan oleh David Easton dapat diterapkan dengan baik dalam konteks penanganan masalah stunting di Kota Surabaya, terutama dalam peran legislator atau anggota DPRD. Konsep ini menyoroti bagaimana informasi dari masyarakat (input) diproses dan diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang responsif (output) oleh para pembuat keputusan politik.

Konsep "input-output system" yang dikembangkan oleh David Easton menggambarkan hubungan yang erat antara kebutuhan masyarakat (input) dengan pembuatan keputusan politik (output) oleh para legislator atau DPRD Kota Surabaya. Dalam konteks penanganan stunting di Kota Surabaya, kolaborasi yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan, anggota DPRD, dan petugas puskesmas menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak buruk stunting bagi generasi mendatang.

Pertama, sebagai pemroses input, legislator berperan penting dalam mengumpulkan informasi dari berbagai stakeholder terkait stunting di Kota Surabaya. Mereka menerima masukan dari puskesmas, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta kelompok-kelompok advokasi yang bekerja dalam bidang kesehatan anak dan gizi. Masukan ini meliputi data epidemiologi, faktor risiko stunting, evaluasi program kesehatan yang ada, serta aspirasi dan kebutuhan langsung dari masyarakat yang terdampak.

Kedua, legislator bertindak sebagai penyaring dalam mengolah informasi yang diterima. Mereka melakukan analisis mendalam untuk

mengidentifikasi isu-isu kunci yang perlu diprioritaskan dalam penanganan stunting. Ini termasuk penilaian terhadap kecukupan sumber daya, kebijakan yang perlu direvisi atau diperkuat, serta kendala-kendala administratif atau legislatif yang mungkin menghambat efektivitas program.

Ketiga, sebagai pembuat kebijakan, legislator berperan dalam merumuskan, mengusulkan, dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap masalah stunting. Mereka berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk eksekutif kota, lembaga pemerintah terkait, dan ahli kesehatan untuk mengembangkan strategi penanganan stunting yang komprehensif. Kebijakan ini mencakup pengalokasian anggaran untuk program kesehatan gizi, pembentukan regulasi yang mempromosikan gizi seimbang, serta program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam konsep "input-output system" yang dikembangkan oleh David Easton, peran legislator atau DPRD Kota Surabaya sangat penting dalam menghubungkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan proses pembuatan keputusan politik. Legislatur seperti DPRD dapat merespons input dari masyarakat, contohnya tuntutan terkait stunting dan kebutuhan informasi mengenai gizi anak yang tepat<sup>44</sup>.

63

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi krusial untuk mencapai nilai-nilai demokrasi yang diinginkan melalui implementasi kebijakan tersebut. Hubungan antara negara dan

22

<sup>44</sup> Geraldy, G. (2024). Konstelasi Politik Klientelisme Gus Ali: Studi Relasi Kuasa Patron-Klien Gus Ali di dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor-Subandi. *Journal of Politica Governo*, 1(2), 5-19.

masyarakat mencerminkan seberapa besar pengaruh masyarakat dalam mengambil keputusan oleh lembaga pemerintahan.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat mencakup berbagai bentuk kontribusi aktif dari warga dalam proses kebijakan publik, seperti memberikan masukan, menyuarakan pendapat, atau terlibat langsung dalam forum atau konsultasi publik. Partisipasi yang kuat dari masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil, tetapi juga menghadirkan perspektif-perspektif yang lebih beragam dan representatif dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Keterlibatan aktif masyarakat juga berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan, karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga mendorong responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi yang ada di dalam masyarakat.

Ketika DPRD menerima masukan dan tuntutan dari warga Surabaya terkait stunting, mereka dapat bekerja sama dengan wali kota untuk merumuskan kebijakan yang relevan dalam bentuk peraturan walikota (perwali). Perwali ini akan menjadi output dari proses kebijakan yang melibatkan legislatif dan eksekutif, yang ditujukan untuk mengatasi masalah stunting di Kota Surabaya.

Dalam konteks kebijakan terkait stunting, <sup>23</sup> Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan puskesmas di berbagai wilayah seperti Dukuh Kupang, Lidah Kulon, Medokan Ayu, Tambak Wedi, dan Kedungdoro, memiliki peran yang

krusial. Mereka berwenang untuk melaksanakan program-program kesehatan <sup>11</sup> yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting di kota tersebut. Dengan demikian, konsep "input-output system" David Easton menggambarkan bagaimana legislator dapat merespons kebutuhan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Dengan konsep input-output system ini, legislator di Kota Surabaya dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang riil tetapi juga merespons secara efektif terhadap dinamika dan kompleksitas masalah stunting. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan adanya koordinasi yang baik antar berbagai lembaga dan kelompok kepentingan untuk <sup>28</sup> mencapai tujuan bersama dalam mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di kota ini.

**KESIMPULAN DAN SARAN****4.1 KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan stunting di Kota Surabaya menggambarkan kolaborasi yang erat dan komprehensif dalam upaya menanggulangi masalah ini. Dinas Kesehatan Kota Surabaya menunjukkan komitmen dalam merancang kebijakan dan program kesehatan yang terintegrasi, dengan fokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat akan gizi dan perawatan prenatal. Anggota DPRD Kota Surabaya juga terlibat aktif dalam advokasi kebijakan kesehatan dan pengawasan program pencegahan stunting, meskipun menghadapi tantangan koordinasi antarlembaga legislatif dan eksekutif. Sementara itu, petugas puskesmas berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan kesehatan langsung kepada ibu hamil dan balita, dengan fokus pada monitoring gizi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kolaborasi yang terjalin antara berbagai pihak ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama untuk mengurangi prevalensi stunting di Kota Surabaya. Meskipun terdapat tantangan seperti akses terhadap sumber daya yang memadai, upaya bersama ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan dan program kesehatan yang berkelanjutan. Diharapkan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya akan mengurangi angka stunting, tetapi juga akan memberikan dampak

positif jangka panjang bagi generasi mendatang dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang sehat dan optimal.

#### 4.2 SARAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi stunting di Kota Surabaya, beberapa saran dapat disampaikan untuk memperkuat strategi penurunan prevalensi stunting secara efektif. Pertama, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antara Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Anggota DPRD, dan petugas puskesmas. Sinergi yang lebih baik antar lembaga ini akan memastikan implementasi kebijakan dan program kesehatan berjalan lancar serta maksimal dalam mencapai tujuan penurunan stunting.

Kedua, penting untuk terus memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk program pencegahan stunting. Anggota DPRD perlu mengadvokasi anggaran kesehatan yang cukup guna meningkatkan cakupan layanan kesehatan, termasuk penyuluhan gizi yang lebih luas kepada masyarakat Kota Surabaya.

Selanjutnya, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan prenatal yang baik. Kampanye edukasi ini dapat melibatkan pendidikan formal, kampanye media sosial, serta program sosialisasi di tingkat komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program pencegahan stunting secara terus-menerus. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan serta menanggapi tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program.

Pengembangan program inovatif juga perlu ditingkatkan, seperti program pendampingan ibu hamil dan pengasuhan anak yang berbasis lokal. Program-program ini dapat memperkuat praktik kesehatan yang baik di masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan stunting.

Terakhir, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di puskesmas perlu ditingkatkan. Investasi dalam peningkatan keterampilan petugas kesehatan, terutama dalam pelayanan gizi dan perawatan prenatal, akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada ibu hamil dan balita.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Kota Surabaya dapat menguatkan strategi dan upaya bersama dalam menanggulangi stunting secara komprehensif. Kolaborasi yang lebih baik, edukasi yang intensif, serta fokus pada monitoring dan evaluasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan generasi masa depan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adeni, S. &. (2018). Komunikasi politik dan keterwakilan perempuan dalam arena politik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 1(2), 1-17.
- Alianti, T. Y. (2024). The Application of David Easton System Theory in The Policy-Making Process of Using Foreign Workers in Indonesia. *ultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(6), 93-95.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ari Susanti, Nur Chabibah, Sapto Dwi Anggoro. (2019). Analisis Faktor Balita Stunting di Banyu Urip Surabaya. *Prosiding Nasional Sikes Hang Tuah Surabaya*, 2.
- Bahri, S. (2023). Implikasi Kebijakan Pembangunan pada Sektor Pariwisata di Pasar Kamu, Kabupaten Deli Serdang. *Langgas Jurnal Studi Pembangunan*, 2(20), 103-107.
- Baihaqi, A. (2019, Oktober 1). *Ini Struktur Empat Komisi DPRD Surabaya Periode 2019-2024*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4729504/ini-struktur-empat-komisi-dprd-surabaya-periode-2019-2024>
- Bungin Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.

- Dafriadi . (2021). Implementasi Program Penanggulangan Stunting. *Universitas Muhammadiyah Makassar* , 14.
- Darmanah, G. d. (2019). *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. (2024). *Pimpinan - DPRD Kota Surabaya*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya: <https://dprd.surabaya.go.id/pimpinan>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Tentang DPR*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.
- Dewi, K. A. (2023). Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1). *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS) Vol. 1, No. 1*, 18-26.
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2020, Januari). *Profil Dinas Kesehatan Kota Surabaya*. Retrieved from Dinas Kesehatan Kota Surabaya: <https://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/profil/profil-dinas-kesehatan-kota-surabaya/>
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2024). *Visi Misi*. Retrieved from Dinas Kesehatan Kota Surabaya : <https://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/profil/visi-misi/>.
- Endang Retno Surjaningrum. (2022). Peta Potensi Pengentasan Stunting di Kota Surabaya. *Jurnal Media Gizi Indonesia Vol il\_SP\_2022*, 3.
- Geraldly, G. (2024). Konstelasi Politik Klientelisme Gus Ali: Studi Relasi Kuasa Patron–Klien Gus Ali di dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan Pengaruhnya

terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor-Subandi. *Journal of Politica Governo*, 1(2), 5-19.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Retrieved from Kementerian Kesehatan Republik Indonesia : <https://monalisa.bkkbn.go.id/downloadinfo/23>

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022, Januari 15). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2023-2027*. Retrieved from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia : <https://www.setneg.go.id/rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2023-2027>

Lexy J. Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Lince Magriasti. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. *Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton*, 3.

LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru . (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah. *Mitra, Permasalahan Anak Pendek (Stunting) Dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting*, 6.

Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. *Proceeding*

*Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011* (pp. 252-258). Banten: LAB-ANE FISIP Untirta .

Nurnyingsih Syam. (2021). Komitmen Politik dalam Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten di Indonesia. *Universitas Gajah Mada*, 1.

Pebriandi, P. F. (2023). Sosialisasi Pencegahan Stunting pada Masyarakat Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 53-57.

Pemerintah Kota Surabaya. (2021). *Dinas Kesehatan*. Retrieved from Pemerintah Kota Surabaya: <https://surabaya.go.id/id/page/0/8077/dinas-kesehata>

Pemerintah Kota Surabaya. (2022, Mei 5). *Kasus Stunting di Surabaya Tinggal 16 Persen, Wali Kota Eri Optimis Segera Zero Stunting*. Retrieved from Pemerintah Kota Surabaya : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/79694/kasus-stunting-di-surabaya-tinggal-16-persen-wali-kota-eri-optimis-segera-zero-stunting>

Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Sekilas Kota Surabaya*. Retrieved from Pemerintah Kota Surabaya : <https://www.surabaya.go.id/page/0/76094/sekilas-kota-surabaya>

Rahayu. (2021). Gambaran Stunting Pada Balita di Indonesia . *Literatur Review*, 8.

Rifiana, A. J. (2018). Analisis kejadian stunting pada balita di desa pasirdoton kecamatan cidahu kabupaten sukabumi provinsi jawa barat tahun 2017-2018. *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya*, 4(2), 22-33.

- Senjaya, I. W. (2017). Kebijakan Publik Perlindungan Pertanian di Kabupaten Batang: Analisis Teori David Easton. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 825-832.
- Siba, M. A. (2021). Governance of Local Government of West Kalimantan Against Illegal Logging. *Journal of Islamic World and Politics Vol. 5, No. 1*, 129-142.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka.
- UCI Faculty Profile System. (2009). *David Easton*. Retrieved from UCI Faculty Profile System: <https://faculty.uci.edu/profile/?facultyId=2547>

# Fajar turnitin bab 1-dafpus.docx

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://e-journal.unair.ac.id">e-journal.unair.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://dinkes.surabaya.go.id">dinkes.surabaya.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://jurnal.ahmar.id">jurnal.ahmar.id</a> Internet Source	<1%
7	Submitted to IAIN Kediri Student Paper	<1%
8	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
9	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://etd.repository.ugm.ac.id">etd.repository.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	Fajar Tri Kesuma, Julia Ivanna. "Strategi Optimalisasi Dana Desa untuk Mencegah dan Menanggulangi Stunting di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang", Journal on Education, 2024 Publication	<1 %
12	<a href="http://journal.lppspsemarang.org">journal.lppspsemarang.org</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://bappedalitbang.surabaya.go.id">bappedalitbang.surabaya.go.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://www.ojs.stikesindramayu.ac.id">www.ojs.stikesindramayu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

20

Internet Source

<1 %

21

[medan.tribunnews.com](http://medan.tribunnews.com)

Internet Source

<1 %

22

[nawalaeducation.com](http://nawalaeducation.com)

Internet Source

<1 %

23

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

<1 %

24

[repository.maranatha.edu](http://repository.maranatha.edu)

Internet Source

<1 %

25

[repository.unwira.ac.id](http://repository.unwira.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[etheses.iainkediri.ac.id](http://etheses.iainkediri.ac.id)

Internet Source

<1 %

27

[www.academia.edu](http://www.academia.edu)

Internet Source

<1 %

28

Fitria Fitria, Ummul Fadhillah. "Eksplorasi Pemberian Makanan Bergizi pada Anak dalam Pencegahan Stunting", Jurnal Kesmas Asclepius, 2024

Publication

<1 %

29

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1 %

30

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

<1 %

31	<a href="http://ejournal3.undip.ac.id">ejournal3.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://journal.um-surabaya.ac.id">journal.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://jurnal.kolibi.org">jurnal.kolibi.org</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://news.detik.com">news.detik.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://repository.ut.ac.id">repository.ut.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://repository.um-surabaya.ac.id">repository.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://repository.unismabekasi.ac.id">repository.unismabekasi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	Dewi Wulandari Nurul Istiqomah, Trisni Utami, Yuyun Sunesti. "Efektivitas	<1 %

Pengalokasian Dana Desa terhadap Program Percepatan Penurunan Stunting",  
Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 2024

Publication

43

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

44

[etd.ummy.ac.id](http://etd.ummy.ac.id)

Internet Source

<1 %

45

[zombiedoc.com](http://zombiedoc.com)

Internet Source

<1 %

46

[journal.ummat.ac.id](http://journal.ummat.ac.id)

Internet Source

<1 %

47

Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Student Paper

<1 %

48

[www.dictio.id](http://www.dictio.id)

Internet Source

<1 %

49

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1 %

50

Submitted to Puslitbang Lektur Kementerian Agama

Student Paper

<1 %

51

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1 %

52	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://www.posoline.com">www.posoline.com</a> Internet Source	<1 %
55	Oslida Martony. "Stunting di Indonesia: Tantangan dan Solusi di Era Modern", Journal of Telenursing (JOTING), 2023 Publication	<1 %
56	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://www.grafiati.com">www.grafiati.com</a> Internet Source	<1 %
59	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
60	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id">jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

63	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://digilib.uinsa.ac.id">digilib.uinsa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
66	Lidia Lushinta, Fara Imelda Theresia Patty, Eliza Anggraini, Rosalin Ariefah Putri. "Dukungan Keluarga Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi dan Balita", Jurnal Kebidanan Malakbi, 2024 Publication	<1 %
67	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://malangposcomedia.id">malangposcomedia.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://peraturan.infoasn.id">peraturan.infoasn.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://talenta.usu.ac.id">talenta.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://repository.dinamika.ac.id">repository.dinamika.ac.id</a> Internet Source	<1 %

73	<a href="http://www.nusantaraterkini.com">www.nusantaraterkini.com</a> Internet Source	<1 %
74	Dina Nata Sari Tampubolon, Wahyu Widiastuti, Yuliati. "Komunikasi Pemasaran Hotel Jodipati Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Hunian di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, 2021 Publication	<1 %
75	<a href="http://beritasulsel.com">beritasulsel.com</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://ejournal.idia.ac.id">ejournal.idia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
80	Noeringhati, Anita. "Rekonstruksi Regulasi Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %

81	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id">e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://stitattaqwa.blogspot.com">stitattaqwa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="http://tambahpinter.com">tambahpinter.com</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="http://wartakepri.co.id">wartakepri.co.id</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="http://www.aksiologi.org">www.aksiologi.org</a> Internet Source	<1 %
89	<a href="http://www.ipssa.org">www.ipssa.org</a> Internet Source	<1 %
90	Susanti Susanti, Sri Gustini, Khairunnisak Khairuninnisak. "Edukasi Pemberian Makanan Tambahan Pada Balita sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Rumoh Gizi Gampong Wilayah Kerja Puskesmas Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat", Jurnal	<1 %

# Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 2024

Publication

---

91	<a href="http://jdih-dprd.bantenprov.go.id">jdih-dprd.bantenprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
92	<a href="http://journal.universitاسbumigora.ac.id">journal.universitاسbumigora.ac.id</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://realita.co">realita.co</a> Internet Source	<1 %
95	<a href="http://tailieu.vn">tailieu.vn</a> Internet Source	<1 %
96	<a href="http://www.ejournal.tsb.ac.id">www.ejournal.tsb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
97	<a href="http://www.ibudanbalita.com">www.ibudanbalita.com</a> Internet Source	<1 %
98	<a href="http://www.klingon-empire.com">www.klingon-empire.com</a> Internet Source	<1 %
99	<a href="http://10k2016.wordpress.com">10k2016.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
100	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %

---

101	Yani Suryani, Rivo Panji Yudha. "Analisis Faktor-Faktor Layanan Kesehatan dan Gizi Pada Penyelenggaraan PAUD Hi dalam Pencegahan Stunting", Jurnal Pelita PAUD, 2023 Publication	<1 %
102	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
103	docobook.com Internet Source	<1 %
104	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
105	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
106	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
107	geograf.id Internet Source	<1 %
108	issuu.com Internet Source	<1 %
109	maulidil.blogspot.com Internet Source	<1 %
110	nanopdf.com Internet Source	<1 %

111	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
112	<a href="http://purwoudiutomo.com">purwoudiutomo.com</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="http://repositori.unsil.ac.id">repositori.unsil.ac.id</a> Internet Source	<1 %
114	<a href="http://repository.pnb.ac.id">repository.pnb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
115	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
116	<a href="http://sdit-lhi.sch.id">sdit-lhi.sch.id</a> Internet Source	<1 %
117	<a href="http://www.cybertokoh.com">www.cybertokoh.com</a> Internet Source	<1 %
118	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
121	<b>Annisa Dina Amalia. "STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN AKAN BAHAYA STUNTING MELALUI PERAN KLINIK KESEHATAN", Jurnal Pengabdian, 2023</b> Publication	<1 %

---

122 Aurel Devany Salsabila, Rosyidatuzzahro Anisyukurillah. "Implementasi Program Kelas Calon Pengantin (Catin) sebagai Wujud Penurunan Angka Stunting di Kelurahan Sidotopo Wetan Surabaya", PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 2024  
Publication

<1 %

---

123 Darmiati Darmiati, Ikrawanty Ayu Wulandari. "Hubungan Tingkat Pendidikan dan Riwayat ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Dahlia Makassar Tahun 2020", Jurnal Kesehatan, 2021  
Publication

<1 %

---

124 M. Putra Halomoan Daulay, Triase. "SISTEM INFORMASI MONITORING KESEHATAN IBU HAMIL PADA 3 FASE TRIMESTER DAN IMUNISASI ANAK", Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi, 2023  
Publication

<1 %

---

125 Taufikur Rahman. "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015  
Publication

<1 %

---

126 Tria Maulana Zhara, Alda Dewi Weston, Revienda Anita Fitrie. "Analisis Pengambilan

<1 %

Keputusan Kebijakan Penanganan Stunting dalam Menanggulangi Tingginya Angka Stunting di Kabupaten Nganjuk", Indonesian Journal of Public Administration Review, 2024  
Publication

---

127	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
128	<a href="http://dprd-sidoarjo.jokab.go.id">dprd-sidoarjo.jokab.go.id</a> Internet Source	<1 %
129	<a href="http://ejournal.upm.ac.id">ejournal.upm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
131	<a href="http://journalpublicuho.uho.ac.id">journalpublicuho.uho.ac.id</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://repo.itera.ac.id">repo.itera.ac.id</a> Internet Source	<1 %
133	<a href="http://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
134	<a href="http://republika.co.id">republika.co.id</a> Internet Source	<1 %
135	<a href="http://smkinsanmandiri.sch.id">smkinsanmandiri.sch.id</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="http://www.banjirembun.com">www.banjirembun.com</a> Internet Source	<1 %

---

137	<a href="http://www.dprd-pesisirbaratkab.go.id">www.dprd-pesisirbaratkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
138	<a href="http://www.gramediapost.com">www.gramediapost.com</a> Internet Source	<1 %
139	<a href="http://www.kompas.com">www.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
140	<a href="http://www.wavefrontac.com">www.wavefrontac.com</a> Internet Source	<1 %
141	Anak Agung Ngurah Kusumajaya, Rofingatul Mubasyiroh, Sudikno Sudikno, Olwin Nainggolan et al. "Sociodemographic and Healthcare Factors Associated with Stunting in Children Aged 6–59 Months in the Urban Area of Bali Province, Indonesia 2018", <i>Nutrients</i> , 2023 Publication	<1 %
142	Fika Kristi Febrina, Novita Rina Antarsih. "Pengaruh Aplikasi PPA Kader terhadap Pengetahuan Kader tentang Deteksi Dini Stunting", <i>Jurnal Kesehatan Manarang</i> , 2021 Publication	<1 %
143	Nurindah Mahereta, Muhammad Fatchur Ozi. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATAAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA", <i>Widya</i>	<1 %

# Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2020

Publication

---

144 Rosi Rosmeilani, Gilar Gandana, Edi Hendri Mulyana. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini", JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education), 2023  
Publication

<1 %

---

145 [doku.pub](#)  
Internet Source

<1 %

---

146 Auliyaaur Rabbani, Charisma Eka Madinah, Vindy Wahyu Arfianti. "Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi Melalui Edukasi dan Pemberian Makanan Tambahan pada Balita di Desa Sukosari Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto", JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 2024  
Publication

<1 %

---

147 Imam Mujahidin, Luhgiatno Luhgiatno, Eman Sukanto. "Peran Profitabilitas dan Good Corporate Governance dalam Memediasi Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan", Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan), 2021  
Publication

<1 %

---

148 [peraturan.bpk.go.id](#)  
Internet Source

<1 %

---

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Fajar turnitin bab 1-dafpus.docx

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---

PAGE 70

---

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---

PAGE 76

---

PAGE 77

---

PAGE 78

---

PAGE 79

---

PAGE 80

---

PAGE 81

---

PAGE 82

---

PAGE 83

---

PAGE 84

---

PAGE 85

---

PAGE 86

---

PAGE 87

---

PAGE 88

---